

**PROGRAM LAYANAN ORANG TERLANTAR
(STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAHAN SOSIAL (PPMKS)
DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Sosiologi



Oleh :

Nama: Putri wisudawati

Nim: 2006026035

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2024**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepda.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama :Putri Wisudawati

NIM :2006026035

Jurusan :Sosiologi

Judul Skripsi : Program Layanan Orang Terlantar (Studi Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) Dinas Sosial Kabupaten Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Kamis, 18 April 2024
Pembimbing,



Nur Hasyim, M.A.
NIP.197303232023211007

**PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM LAYANAN ORANG TERLANTAR
(STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAHAN SOSIAL (PPMKS)
DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG)**

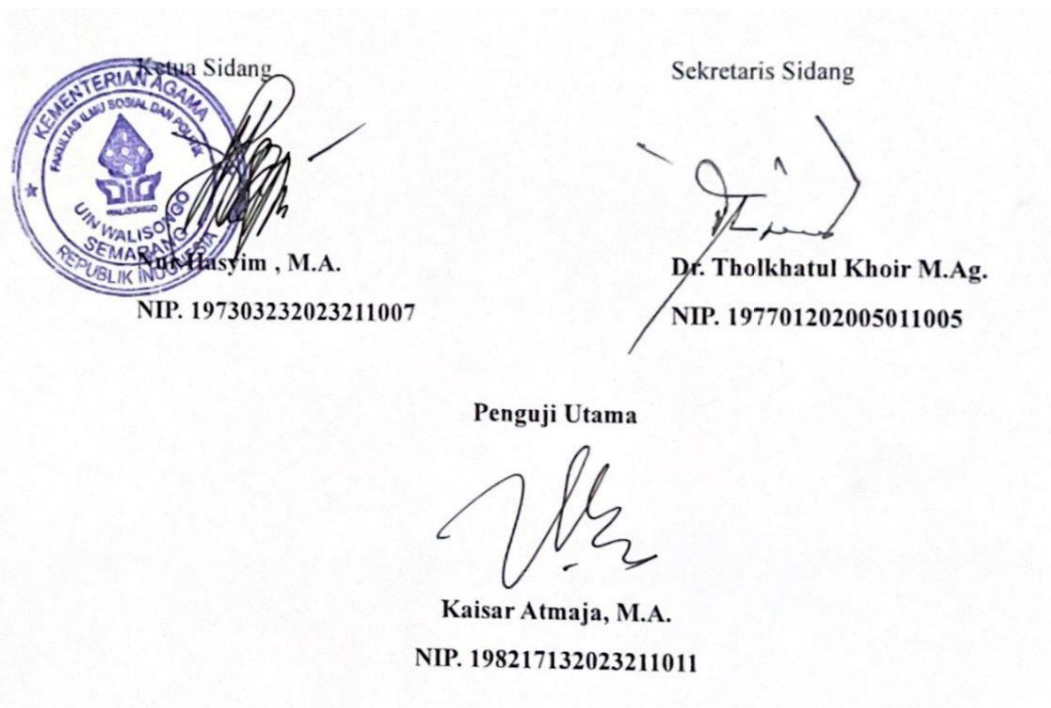
Disusun oleh:

PUTRI WISUDAWATI

2006026035

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada 08, Mei, 2024 dan dinyatakan lulus

Susunan dewan penguji



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri', with a stylized flourish underneath.

Putri Wisudawati

2006026035

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul; **PROGRAM LAYANAN ORANG TERLANTAR (STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPMKS) DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG)** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi pada program Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyeleain studi dan penulisan skripsi ini, penulisan banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang takterhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Wali Dosen yang telah bersedia memberikan tenaga, waktu, bimbingan, dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Ibu Naili Ni'matul Illiyun, M.A. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Nur Hasyim, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu

pengetahuannya kepada penulis selama menempuh proses pendidikan dibangku kuliah.

7. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Fajar Yono dan Ibu Rismowati yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, semangat dan kasih sayang yang tak pernah henti selama ini. Semoga Allah SWT menggantinya dengan kesehatan, keberkahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, *aamiin*.
8. Kakak tercinta yaitu Faris Eka Paksi dan Fourisa Shanty yang selalu menjadi alasan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Dinas sosial Kabupaten Semarang sudah memberikan sebagai tempat bahan rencana penelitian skripsi.
10. Setiyani Eka Ambarsari, SE selaku ketua UPTD Among Jiwo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.
11. Demawati Nur Azizah, S.Psi (Psikolog), Etika Widi, A.Md (perawat), Amir Hamzah, A.Md (bagian), Isfitriah, S.Kom, Hesti Wulandari, SE, Murni Lestari (dapur), Dwi Fatma Nilamsari (dapur), Agnes Susi H (obat)Maria Martianti, S.Gz dan seluruh pengurus Komunitas Sahabat Difabel Semarang yang telah bekerjasama dan selalu membantu mendampingi penulis selama proses penelitian.
12. Sahabat dan Teman Tersayang yaitu Gita Nugrahini, Ana Safitri, Aisya Su'ada, Dian Anisa Puspitasari, Yusuf Fajar Hidayat, Cindy Amalia, Muhammad Abdul Azis, Afni Mutiara, Nadya Swastika, cimel, Mayla fayza, dan Kiky Yuli Rosita tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!
13. Teman-teman Sosiologi A angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Peneliti ucapkan terima kasih.

Demikian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga laporan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa laporan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap diberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan ke depannya.

Semarang, 21 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri', with a stylized flourish underneath.

Putri wisudawati

NIM. 2006026035

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Orang tua tersayang Bapak Fajaryono dan Ibu Rismowati yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibu.
2. Saudara saya kakak Faris Eka Paksi dan Fourisa Shanty, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

MOTTO

“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan !”

(Steve Jobs)

ABSTRAK

Masalah orang terlantar terjadi dalam masyarakat, seperti korban bencana, orang lanjut usia, orang cacat, gelandangan, pengemis, ODGJ, dan anak terlantar. Di Indonesia, ada sekitar 77.500 orang terlantar di kota-kota besar. Di Kabupaten Semarang, masalah ini mempengaruhi lingkungan, kependudukan, keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Program PPMKS dilakukan oleh Pemerintah melalui kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan panti sosial rehabilitasi. Pekerja sosial membantu menangani konflik sosial dan memberikan rehabilitasi jasmani, rohani, psikologi, pendidikan, bantuan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini bertujuan untuk membantu orang terlantar menjadi mandiri dan mengembangkan keterampilan serta kreativitas mereka. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan dampak dari program PPMKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, partisipatif, wawancara semi-struktural melibatkan 3 informan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara substansial, analisis penelitian ini mengadopsi perspektif struktural- fungsionalnya yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.

Implementasi program PPMKS mempunyai dampak tertentu terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup para pengungsi di wilayah tersebut. Secara khusus, program PPMKS berhasil meningkatkan akses masyarakat terlantar terhadap layanan dasar seperti perumahan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan. Program ini juga memberikan bantuan pengembangan keterampilan dan pemulihan jasmani dan rohani bagi para pengungsi. Selain itu, pelaksanaan program PPMKS juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial, dengan meningkatkan integrasi para pengungsi di tengah masyarakat dan mengurangi stigma sosial terhadap mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi para pengungsi dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan mereka. Namun penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan dalam pelaksanaan program PPMKS, antara lain keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Layanan Orang Terlantar, Orang Terlantar, Program PPMKS

ABSTRACT

The problem of abandoned people occurs in society, such as disaster victims, elderly people, disabled people, homeless people, beggars, ODGJ, and abandoned children. In Indonesia, there are around 77,500 displaced people in big cities. In Semarang Regency, this problem affects the environment, population, security, order and crime. The PPMKS program is carried out by the Government through collaboration with the Semarang Regency Social Service, Central Java Provincial Social Service, and rehabilitation social institutions. Social workers help deal with social conflicts and provide physical, spiritual, psychological rehabilitation, education, social assistance, and meeting basic needs. This program aims to help displaced people become independent and develop their skills and creativity. Therefore, the aim of this research is to explain the implementation and impact of the PPMKS program carried out by the Semarang Regency Social Service.

This research uses qualitative research with a descriptive approach. This research is field research, which relies on primary and secondary data sources. Data collection methods include observation, participatory, semi-structured interviews involving 3 informants, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model approach, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Substantially, this research analysis adopts the structural-functional perspective developed by Talcott Parsons.

Implementation of the PPMKS program has a certain impact on the welfare and quality of life of displaced people in the area. In particular, the PPMKS program has succeeded in increasing neglected people's access to basic services such as adequate housing, health services and education. This program also provides assistance in skill development and physical and spiritual recovery for displaced people. Apart from that, the implementation of the PPMKS program also has a positive impact on the social environment, by increasing the integration of displaced people in the community and reducing social stigma towards them. This creates a more inclusive and supportive environment for displaced people in achieving their independence and well-being. However, this research also highlights several challenges in implementing the PPMKS program, including limited resources and coordination between related institutions.

Keywords: *Services for Abandoned People, Neglected People, PPMKS Program*

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka teori.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematik Penulisan Skripsi	19
BAB II PROGRAM LAYANAN ORANG TERLANTAR DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSON.....	21
A. Program Layanan Orang Terlantar, Orang Terlantar dan Program PPMKS.....	21
1. Program Layanan Orang Terlantar	21
2. Orang Terlantar	23
3. Program PPMKS.....	24
B. Teori Fungsionalisme Struktural Menurut Talcott Parsons	28
1. Adaptation (Adaptasi)	27
2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan).....	28

3. Integration (Integrasi).....	28
4. Latency (Pemeliharaan Pola).....	28
C. Prespektif Islam tentang Orang Terlantar.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN PROFIL	
DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG	31
A. Gambaran Umum Kabupaten	
Semarang.....	31
1. Kondisi Geografis Kabupaten Semarang.....	31
2. Kondisi Topografis Kabupaten Semarang	33
3. Kondisi Demografi Kabupaten Semarang.....	34
4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Semarang.....	39
5. Kondisi Kesehatan Kabupaten Semarang.....	40
B. Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	43
1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Semarang	43
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	44
4. Nilai Dasar Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	43
5. Implementasi Program Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	45
6. Kelompok Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	47
7. Strategis Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	47
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM PPMKS UNTUK ORANG	
TERLANTAR DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG	47
A. Implementasi Program PPMKS.....	47

1. Perencanaan.....	48
2. Sosialisasi.....	52
3. Pelaksanaan	53
a. Shelter.....	58
4. Rujukan Ke Panti Sosial.....	67
B. Penerapan Program PPMKS Penerima Manfaat.....	76
1. Kehabisan Bekal	76
2. Bencana Alam	81
3. Orang Terlantar yang Meninggal.....	83
C. Analisis Implementasi Program PPMKS Kabupaten Semarang.....	86
1. Adaptation (Adaptasi).....	86
2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan).....	88
3. Integration (Integrasi)	89
4. Latency (Pemeliharaan Pola)	89
BAB V DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM PPMKS ORANG TERLANTAR YANG DITERAPKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG	91
A. Dampak Internal	95
B. Dampak Eksternal	104
BAB VI PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan.....	35
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa) Tahun 2020...	36
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2021.....	37
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Keyakinan (Jiwa) Tahun 2022.....	37
Tabel 3.5 PPMKS Berdasarkan Kategori di Kabupaten Semarang Tahun 2022....	38
Tabel 3.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di kabupaten Semarang Tahun 2022	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang	32
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Tumbuh	40
Gambar 3.3 Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	41
Gambar 4.1 Memberikan Makanan kepada ODGJ Terlantar	64
Gambar 4.2 Kegiatan Jasmani & Rohani Senam serta Berjemur.....	65
Gambar 4.3 Rutin Setiap Pagi Memberikan Obat Penenang.....	66
Gambar 4.4 Pemeriksaan Kesehatan	67
Gambar 4.5 Sosialisasi Pemberdayaan	69
Gambar 4.6 Pemberian Bantuan Orang Terlantar Disabilitas	69
Gambar 4.7 Kondisi Fasilitas Kamar Orang Terlantar	72
Gambar 4.8 Pemeriksaan Kesehatan ODGJ Disabilitas	72
Gambar 4.9 pemberian Makanan ODGJ Terlantar	73
Gambar 4.10 Sosialisasi Orang Terlantar.....	74
Gambar 4.11 Pemeriksaan Kesehatan ODGJ Disabilitas	74
Gambar 4.12 Kegiatan Jasmani & Rohani Senam Saat Berjemur	75
Gambar 4.13 Memberikan Bantuan Bencana Alam Orang Terlantar.....	82
Gambar 4.14 Mewawancari ODGJ Terlantar.....	92
Gambar 4.15 Memeriksa ODGJ Terlantar.....	96
Gambar 4.16 Penyerahan Bantuan Disabilitas	102
Gambar 4.17 Sosialisasi Kerupuk Tulang Ikan.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah orang terlantar yaitu permasalahan sosial terdapat dalam kehidupan masyarakat, seperti korban bencana alam, orang lanjut usia terlantar, orang cacat terlantar, gelandangan, pengemis, ODGJ terlantar dan anak terlantar (Handayani, 2019). Orang terlantar banyak ditemukan di beberapa kota besar di Indonesia. Jumlah orang terlantar di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 77.500 jiwa yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia (Meiliana, 2019). Berdasarkan data di Kabupaten Semarang jumlah orang terlantar yang data dinas s'osial pada tahun 2022 mencapai 426 orang dengan rincian sebagai berikut terlantar faktor bencana 186 orang, disabilitas 40 orang, lanjut usia terlantar 40 orang, anak terlantar 150 orang dan gelandangan 10 orang. Adanya orang terlantar di wilayah Kabupaten Semarang menimbulkan permasalahan antara lain lingkungan hidup, permasalahan kependudukan, permasalahan keamanan dan ketertiban, serta permasalahan kriminalitas. Masalah sosial ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya tidak mempunyai anggota keluarga, tidak dipedulikan anggota keluarga, mencari anggota keluarga, kehabisan bekal saat mencari pekerjaan, fisik yang sudah tidak mampu, dan bencana alam. Sedangkan anak terlantar berkaitan dengan permasalahan lain, baik yang bersifat internal seperti psikologi dan keluarga, maupun faktor eksternal ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, dan agama atau kombinasi keduanya.

Anak jalanan adalah diantara contoh anak terlantar. Anak jalanan dapat diamati karena berbagai macam penyebab, tidak hanya faktor ekonomi saja tetapi juga banyak penyebabnya seperti kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga, kenakalan remaja, kebiasaan didikan

orang tua yang buruk (Khairunnisa et al., 2020). Salah satu model kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang adalah ada orang tua yang tidak peduli kepada anak maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Semarang khususnya bidang PPMKS melakukan penanganan dengan hal yang terkecil menanyakan apakah anak tersebut masih memiliki keluarga terdekat jika sudah tidak memiliki maka bidang PPMKS ini akan turun tangan untuk melindungi.

Masalah sosial orang terlantar menjadi perhatian pemerintah di antara bentuk perhatian pemerintah terhadap orang terlantar adalah program bagi penyandang masalah jaminan sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga atau sekelompok orang yang mempunyai kendala, kesulitan atau penyimpangan, tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya mengakibatkan tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. Kebutuhan fungsi sosial mereka tidak dapat dipenuhi Kehidupan material, spiritual dan sosial yang lengkap dan wajar (Sulaeman,2019).

Program PPMKS yang menjamin perlindungan terhadap orang terlantar telah dilaksanakan oleh pemerintah. Selain Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang bekerjasama melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, program PPMKS juga dijalankan oleh panti sosial rehabilitasi sebagai tempat penampungan orang terlantar, Program PPMKS juga dilaksanakan oleh dinas sosial melalui pembentukan pekerja sosial yang tersebar di seluruh wilayah dinas sosial untuk `menangani konflik sosial mirip masyarakat terlantar pada wilayah Kabupaten Semarang selain itu, perhatian pemerintah terhadap orang terlantar diberikan dalam bentuk pelayanan perlindungan berupa penyediaan panti sosial yang memberikan fasilitas berupa pelayanan rehabilitasi jasmani & rohani, psikologi, pendidikan, pemberdayaan dan bantuan sosial.

Fasilitas lain yang di berikan panti sosial adalah pemenuhan kebutuhan dasar orang terlantar yang meliputi pemenuhan kasih sayang, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pemulihan mental serta pemberdayaan.

Seperti yang kita ketahui ada banyak jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang membahas tentang orang terlantar salah satunya adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh (Qorina2022) Peran Dinas Sosial dalam mencegah gelandangan dan pengemis di Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini bertujuan pada upaya yang diharapkan dapat memberikan dampak positif. Mulai dari upaya preventif untuk mencegah dan munculnya gelandangan dan pengemis di masyarakat dari upaya represif untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis serta upaya rehabilitasi hingga penelitian atau seleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan ke dalam panti sosial, hingga penentuan kualifikasinya. Institusi sosial akan membimbing dan mengubah sikap mental orang terlantar dari keadaan tidak produktif menjadi produktif. Peran dinas sosial ini menginginkan adanya penanggulangan masalah sosial orang terlantar usaha yang dilakukan menyediakan panti sosial serta pelayanan yang tersedia agar berdampak positif dengan mengadakan adanya rehabilitasi untuk merubah kehidupan yang lebih sejahtera. Selanjutnya jurnal penelitian yang ditulis oleh (Veronica,2023) menjelaskan bahwa peran dinas sosial sangat penting dalam membina dan memberikan bantuan kepada masyarakat terlantar, terutama dalam bentuk pelatihan berupa pemberian keterampilan (seperti pelatihan teknis sablon, pembuatan petak bunga dan pembuatan kotak tisu) dan pengembangan pendidikan moral. Untuk mewujudkan itu orang terlantar membutuhkan adanya wadah untuk membangun dan mengembangkan keterampilan serta kreatifitas yang dimiliki individu. Hal tersebut bisa diawali dengan

membangun pola pikir merubah kehidupan yang lebih baik untuk kesejahteraan hidup setelah diberikan adanya pemberdayaan.

Implementasikan program PPMKS untuk memutus mata rantai orang-orang terlantar di Kabupaten Semarang berupa adanya menyediakan rumah singgah atau panti sosial yang bernama UPTD Among Jiwo. Lembaga sosial ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk pembinaan atau rehabilitasi yang bertujuan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat untuk menjadi individu yang lebih baik dan mandiri serta hidup sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian tentang Program Layanan Orang Terlantar (Studi Implementasi Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana program PPMKS untuk orang terlantar di implementasikan di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana dampak implementasi program PPMKS yang diterapkan Dinas Sosial Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana program PPMKS telah di implementasikan dalam mencapai tujuan-tujuannya terkait pelayanan dan perlindungan bagi orang-orang terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis dampak program PPMKS pada kondisi sosial dan kesejahteraan orang-orang terlantar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk peneliti membantu dalam mengembangkan teori dan konsep yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk pemahaman lebih mendalam tentang masalah orang terlantar dan efektivitas program PPMKS.
 - b. Bagi para mahasiswa, penelitian ini guna sebagai referensi serta melakukan penelitian selanjutnya serta digunakan sebagai referensi dan informasi dalam menciptakan karya ilmiah lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengevaluasi program, hasil penelitian ini dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam mengevaluasi sejauh mana program PPMKS mereka efektif dalam mengatasi masalah orang terlantar di kota tersebut.
 - b. Untuk layanan program, Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang berikan kepada warga pengungsi, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan dukungan yang lebih baik dan berkelanjutan.
 - c. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan acuan ini dapat membantu pengambilan keputusan di tingkat pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi masalah orang terlantar di wilayah tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang orang terlantar sudah dilakukan oleh beberapa penelitian. Penulis mengkategorikan terkait dengan orang terlantar tiga pembahasan tematik berikut :

1. Layanan Orang Terlantar

Kajian yang membahas tentang layanan orang terlantar telah dilakukan oleh beberapa ahli, misalnya Maryatun (2020), Arniyanti (2023), Khoza (2023), Budi (2021) dan Payandro (2023). Kajian

Maryatun (2020) meneliti kajian tugas pokok pada panti pelayanan sosial di bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Administrator mampu berperan baik dalam aspek penerimaan, kreatif, demokrasi, kepercayaan, perencanaan pengorganisasian, pendelegasian dan pembuatan keputusan, meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi sosial dengan menselaraskannya melalui upaya pemberdayaan sehingga program bisa berjalan lebih dinamis dan dapat membantu upaya kemandirian PPKS PGOT dengan praktek serta pengelolaan usaha secara langsung (pelatihan kewirausahaan).

Selanjutnya kajian Arniyanti (2023) yang menemukan bahwa pelayanan sosial yaitu pelayanan kelembagaan, pelayanan ini dilakukan jenis pelayanan yang berbasis kelembagaan untuk memperluas jangkauan pelayanan. Pelayanan masyarakat dan pelayanan sosial anak terlantar dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat yang telah tumbuh dimasyarakat.

Selanjutnya kajian Khoza (2023) meneliti kajian layanan sosial Mardi Utomo dalam menjalankan pelayanannya sangat memfokuskan kesejahteraan bagi para PGOT. Hal ini dibuktikan melalui kondisi penerima manfaat sebelum masuk ke panti dengan kondisi yang terbatas kemudian dengan adanya pelayanan dan kegiatan bimbingan hingga pelatihan keterampilan yang dijalankan oleh PPS Mardi Utomo Semarang berdampak sangat baik. Semua kegiatan pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi para penerima manfaat sehingga semuanya merasakan dampak yang terasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia, bantuan ATENSI, dan menciptakan tenaga kerja yang terampil.

Selanjutnya kajian Budi (2021) disebut juga sebagai layanan sosial atau pekerjaan sosial merupakan salah satu dari banyak

layanan publik pemerintah dan swasta yang dimaksudkan untuk membantu orang atau kelompok yang kurang beruntung, tertekan atau rentan. Istilah layanan sosial juga menunjukkan profesi yang terlibat dalam memberikan layanan tersebut. Di beberapa negara, dibuat perbedaan antara “layanan sosial” yang menunjukkan program, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan yang melayani masyarakat umum dan “layanan kesejahteraan” yang menunjukkan bantuan yang ditunjukkan kepada kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang cacat dan sebagainya.

Selanjutnya kajian penelitian Payandro (2023) pelayanan sosial haruslah mencapai sasarannya dengan tepat. Dengan penguatan dan peningkatan pelayanan sosial secara adaptif, responsif, terstruktur dan sistematis akan semakin meningkatkan kepuasan dan ketercapaian tujuan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial khususnya kepada klien yang dalam hal ini adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) kualitas pelayanan dapat diukur berdasarkan standar yang dibuat oleh organisasi atau dari literatur profesional atau dari lembaga-lembaga yang bertugas mengatur, seperti tepat waktu, taat azas, dapat diakses, manusiawi dan kelayakan teknis pelayanan. Kepuasan klien juga diperhatikan yaitu berkaitan dengan penilaian klien tentang kualitas dan pengaruh pelayanan. Kepuasan klien dapat juga diperoleh dari data tentang tingkat kehadiran klien, pemutusan hubungan yang terlalu awal, permintaan klien untuk memperoleh lagi pelayanan, dan rujukan dari klien-klien sebelumnya.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap beberapa penelitian diatas penelitian ini pada kajian mengenai peran dinas sosial dalam terhadap pelayanan sosial bagi orang terlantar melalui program PPMKS. Layanan sosial yang mencakup program seperti perawatan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat umum dan "layanan

kesejahteraan" yang lebih ditujukan kepada kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang cacat dan lainnya.

2. Orang Terlantar

Kajian yang membahas tentang orang terlantar telah dilakukan banyak ahli, misalnya Fadri (2019a), Fadri (2019b), Eka (2020), Khoirunnisa (2020) dan Aprilyanti (2021). Kajian Fadri (2019a) menjelaskan bahwa para terlantar perkotaan dan pengemis yang tidak memiliki minat terhadap dunia kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jumlah uang yang terjamin setiap harinya tanpa adanya keahlian khusus. Perasaan malas dan tidak berusaha membuat para gelandangan dan pengemis nyaman menjalankan kegiatan tersebut. Sementara itu kajian Fadri (2019b) tentang gelandangan dan Pengemis (GEPENG) menemukan bahwa mereka yang kehilangan tempat tinggal dan pengemis akan ditelantarkan. karena mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap karena berbagai faktor mereka tetap tinggal di kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, bantaran sungai, stasiun kereta api serta banyak bangunan umum lainnya untuk tidur serta melakukan aktivitas sehari-hari

Kajian Eka (2020) menemukan bahwa gelandangan dan pengemis merupakan wujud entitas kelompok masyarakat yang sangat rentan dari segi kondisi perekonomian karena berada dalam kondisi sub-marginal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa et al (2020) menemukan bahwa realitas anak jalanan tidak lepas dari konflik internal dan eksternal seperti konflik ekonomi, psikologis, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, agama, serta keluarga. Mereka adalah korban dari keadaan terjadi oleh individu, baik internal, eksternal atau kombinasi keduanya.

Sementara itu, Apriliyanti (2021) menemukan bahwa pengemis terjadinya salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan pada Indonesia. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi

pengemis sebab tidak memiliki tempat tinggal yang layak serta dapat menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap beberapa penelitian diatas penelitian ini akan memberikan sumbangan pada kajian mengenai faktor-faktor orang terlantar secara internal maupun eksternal.

3. Program PPMKS

Kajian yang membahas tentang program PPMKS telah dilakukan oleh beberapa ahli, misalnya Siti Juhariah (2019), Arimbi Yuniza Dian Sekarini (2019), Nur Handayani (2019), Erlinda (2021) dan M. Danang Wicaksono, Hartawan, dan Agus Tiansah (2022). Kajian Siti Juhariah (2019) Penyandang Masalah Perlindungan Sosial (PMKS) menyatakan bahwa seseorang, keluarga atau sekelompok orang mengalami kendala, masalah serta penyimpangan, tidak bisa menjalankan fungsi sosial dan tidak dapat memenuhi suatu kebutuhan sosial. PMKS sebenarnya tidak hanya melindungi masyarakat terlantar saja, namun juga melindungi jaminan sosial seperti JKN, bantuan sosial seperti risiko sosial, bantuan bencana alam, serta pengemis, tunawisma dan orang terlantar. Selanjutnya pada kajian Arimbi Yuniza Dian Sekarini (2019) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencatat Samarinda juga terus mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Sementara itu Nur Handayani (2019) penelitian terdahulu mengetahui atas pengelolaan PMKS yang bersifat urgent dan emerging di Kota Sukabumi belum diperhatikan yang baik akibatnya belum terselesaikannya pekerjaan pengelolaan.

Selain itu Ria Mardiyanti (2021) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kawasan ini mengatsi permasalahan antar anak jalanan di Kota Pekanbaru. Kebijakan dinas sosial terhadap anak jalanan sangat tepat sasaran. Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah membentuk sejumlah forum sosial untuk membantu anak jalanan. Selain itu kajian M. Danang Wicaksono, Hartawan, dan Agus Tiansah

(2022) bahwa peneliti juga menemukan Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan sangat menentukan persepsi kepada peran Dinas Sosial dalam melayani pelayanan kepada anak jalanan, di bidang reintegrasi sosial.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap beberapa penelitian diatas penelitian ini akan memberikan sumbangan pada kajian mengenai fasilitas bantuan PPMKS dari Dinas Sosial.

F. Kerangka teori

1. Definisi konseptual

a. Orang terlantar

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 “orang terlantar adalah seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus”.

b. Layanan Orang Terlantar

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 “program layanan orang terlantar adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

c. Program PPMKS

Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 dalam standar nasional sumber daya manusia lembaga perlindungan sosial diatur bahwa PMKS ialah pribadi, keluarga, kelompok, serta warga negara sebab adanya kendala, persoalan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas pelayanannya, peran sosial, akibatnya kebutuhan fisik, mental dan sosial tidak dapat dipenuhi oleh tenaga ahli lengkap dan masuk akal (Menteri

Sosial Nomor 29 Tahun 2017 dan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017).

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 “Program PMKS merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, mutu dan keberlanjutan hidup serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat dengan mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan sosial perkumpulan dengan program yang ditujukan kepada penyandang disabilitas sosial serta masalah perlindungan”.

d. Fungsionalisme Struktural Sebagai Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural menurut pemikiran sosiologi modern Talcott Parsons yaitu teori struktural fungsional. Teori ini salah satu peristiwa sosial. Teori struktural-fungsional cenderung memberikan akibat signifikan terhadap ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi pada era modern hingga saat ini. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat ialah salah satu bagian suatu sistem sosial berasal struktur-struktur saling berhubungan dan bekerja sama untuk membentuk keseimbangan. Teori struktural-fungsional lebih menekankan di keteraturan sistem serta struktur. Teori ini memusatkan penelitian satu peristiwa sosial dibandingkan peristiwa sosial lainnya (Ritzer,1985).

Teori struktural-fungsional awalnya dikembangkan oleh Parson lebih sering diklaim sebagai teori integrasi karena berkaitan dengan integrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Unsur masyarakat dalam terpadu mencakup suatu sistem yang mengembangkan di masyarakat dan berguna dalam menciptakan keseimbangan (Ritzer,1985). Ketika masyarakat ingin menciptakan stabilitas dan keselarasan dalam suatu lingkungan atau organisasi, tetapi struktur dan sistem terbentuk di dalamnya harus berfungsi. Salah satu tujuan utama teori struktural-fungsional Talcott Parsons adalah

membangun ketertiban sosial dalam masyarakat. Teori ini meyakini adanya proses integrasi dalam warga akan berjalan dengan baik sehari-hari bila komponen-komponen atau kesatuan-kesatuan yang terkait bisa menjalankan fungsi serta strukturnya dengan baik. Teori struktural-fungsional memandang empiris sosial menjadi suatu sistem hubungan yaitu suatu sistem sosial yg seimbang serta terintegrasi secara khusus terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung (Ritzer,1985).

Jadi bila suatu sistem atau struktur sosial adanya perubahan juga di sistem yang lain. Teori ini mengasumsikan adanya seluruh elemen warga lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu komunitas akan menyebabkan perubahan di komunitas lainnya.

Teori ini mempelajari fungsi terdiri kiprah lembaga sosial atau struktur sosial dalam tindakan sosial tertentu di kalangan rakyat negara serta menelaah pola hubungannya dengan komponen sosial lainnya. Hal ini pembahasannya wacana teori struktural-fungsional Talcott Parsons berkata tentang sistem sosial pada masyarakat terdiri berasal sejumlah agen individu, dimana agen individu tersebut berinteraksi dengan individu lain terstruktur pada satu atau lebih organisasi.

Parsons memakai teori struktural-fungsionalnya buat memfokuskan penelitiannya mencakup sejumlah sistem dan struktur sosial yang ada dalam warga yang saling mendukung sebagai akibatnya menghasilkan keseimbangan yang dinamis.

1) Adaptation

Adaptasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu menyesuaikan diri berkaitan lingkungannya dan lingkungannya agar kita dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Adaptasi yang terjadi disini menangani adanya

masalah sosial yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang terkait orang terlantar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya mereka melakukan mengemis dengan meminta rasa belas kasihan kepada orang lain agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya bantuan yang diberikan dinas sosial senantiasa untuk masyarakat untuk kembali ketempat asalnya.

2) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mengidentifikasi serta mencapai tujuan utamanya. Dapat kita lihat yang terjadi masalah sosial orang terlantar ini memiliki tujuan tertentu yang apa mereka lakukan yaitu adanya faktor mencari pekerjaan, mencari anggota, pekerjaan pengemis dan kehabisan bekal serta adanya terjadinya penipuan mereka melakukan senantiasa untuk memenuhi kebutuhan mereka mencapai kesejahteraan.

3) *Integration* (Integrasi)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mengatur korelasi antar komponennya dan harus mampu mengatur hubungan ketiga fungsi lainnya. (adaptasi, pencapaian tujuan dan latensi) sehingga akan tercipta kesatuan hubungan yang harmonis antar komponen. Dapat kita lihat dalam penelitian ada beberapa faktor yang terlibat dari orang terlantar sebagai pelaku utama, dinas sosial sebagai perantara penyelesaian permasalahan serta pemerintah sebagai pemberi bantuan.

Bagaimana mereka harus melaraskan menjalankan peran apa yang dibutuhkan orang terlantar maka dinas sosial memberikan suatu layanan perlindungan bantuan sesuai kriteria peraturannya serta pemerintah sebagai koordinasi menyerahkan pelayanan yang diberikan kepada dinas sosial.

4) *Latency* (Pemeliharaan pola)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, meningkatkan dan melengkapi motivasi individu dan tatanan budaya. Hal ini dinas sosial sebagai peran penting untuk memberikan layanan perlindungan motivasi untuk mereka merubah diri menjadi lebih baik. Layanan yang diberikan dinas sosial berupa panti sosial yang didalamnya diberikan fasilitas motivasi berupa psikologi, kesehatan, jasmani & rohani, pendidikan serta pemberdayaan ini dapat merubah kehidupan orang terlantar untuk mensejahterahkan kehidupannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian ini dilakukan secara sistematis buat mengumpulkan data pada lapangan (Arikunto,2006). Kemudian penelitian ini memakai metode kualitatif ialah penelitian yang menggambarkan realitas atau fenomena sosial dan menganalisisnya sesuai kebutuhan lapangan (Sugiyono,2018).

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2018) Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mendeskripsikan peristiwa terjadi secara realistis, nyata serta terbaru karena penelitian tadi melibatkan pembuatan deskripsi, gambar atau lukisan peristiwa berkaitan

sistematis, fakta, menyeluruh dan korelasi antar kenyataan yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) data utama artinya data yang menyampaikan data tertentu pada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri berasal peneliti berasal asal daerah dimana objek penelitian pertama kali dilakukan. Peneliti menggunakan apa yang akan terjadi dalam wawancara yang diperoleh asal informan terkait menggunakan memakai topik penelitian menjadi data primer.

Data primer dalam penelitian hal itu ditempuh melalui observasi partisipatif dengan menggunakan peran dalam pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya melayani dan melindungi masyarakat terlantar sesuai dengan tata cara yang diterapkan peraturan di Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan UPTD Among Jiwo. Selain itu, data primer tersebut akan diambil melalui wawancara dengan beberapa pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) menunjukkan bahwa data sekunder ialah data yang tidak memberikan data secara tertentu di pengumpul data. Data sekunder penelitian ini pada dapatkan melalui buku sertifikat, jurnal penelitian, internet serta sumber lainnya. Data sekunder untuk penelitian ini kemudian akan digali oleh peneliti melalui catatan yang disimpan oleh pekerja sosial yang melindungi dan melayani komunitas terlantar dengan menggunakan laporan pendukung, sertifikat dan foto.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi ialah suatu teknik pengumpulan catatan yang memiliki ciri spesifik dibandingkan menggunakan penggunaan teknik lain misalnya wawancara dan angket. Bila wawancara serta kuisioner selalu berkomunikasi dengan memakai orang, maka observasi tidak hanya terbatas hanya masyarakat saja namun di objek alam lainnya menurut (Sugiyono,2018). Dalam penelitian ini penulis mengamati tugas masing-masing pekerja sosial ketika menangani permasalahan orang terlantar, misalnya masyarakat ikut serta dalam observasi ketika pekerja sosial melakukan asesmen atau dalam artian pemeriksaan awal terhadap permasalahan orang terlantar sebagai korban.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data bila peneliti berkeinginan melakukan penelitian pendahuluan buat mengetahui konflik guna perlu diteliti, serta bila peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang responden (Sugiyono,2018). Pada penelitian ini, penulis menggali data berasal informan memakai mengajukan pertanyaan tepat menggunakan fokus penelitian. Informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yakni 4 orang pekerja sosial aktif dalam penyelenggaraan PPMKS yang ada di dinas sosial yaitu kepala bidang beserta 3 staff peksos berdasarkan kriteria yaitu kriteria mengetahui program PPMKS dan terlibat aktif pelaksanaan program PPMKS beserta penerima manfaat program PPMKS di Kabupaten Semarang sebagai subjek data dalam kota bebas orang terlantar. Teknik pengambilan sampel menggunakan penelitian ini merupakan purposive yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan data sesuai

pertimbangan tertentu, misalnya siapa yang dikatakan memiliki berita terbaik tentang apa yang kita harapkan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) Dokumentasi ialah suatu metode yg dipergunakan buat memperoleh data dan informasi berupa buku, berkas, dokumen, catatan tertulis serta gambar berupa laporan serta konflik buat meningkatkan penelitian. Studi dokumen berarti melengkapi metode observasi atau wawancara yang akan lebih dapat diharapkan dan memiliki keterpercayaan yang tinggi. Jika didukung foto-foto atau makalah akademis yang ada. Pada penelitian ini penulis akan mendalami dokumentasi menggunakan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pekerja sosial berupa laporan, sertifikat atau foto pendukung. di penelitian ini penulis akan mendalami melalui dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pekerja sosial yang dapat berupa laporan, sertifikat atau foto pendukung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses meneliti serta mengumpulkan data secara sistematis bisa dilakukan wawancara, catatan, kerja lapangan dan dokumen menggunakan pengorganisasian data di kategori-kategori, memecahnya sebagai unit-unit, mensintesis, mengorganisasikan pada pola, memilih apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari serta menarik suatu kesimpulan. Hasilnya, peneliti sendiri serta orang lain bisa menggunakannya sekedar untuk memahaminya berdasarkan Sugiyono (2018) analisis data di penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengumpulan data kemudian sesudah pengumpulan data selesai pada jangka waktu eksklusif. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai terselesaikan, akibatnya data menjadi jenuh. Miles serta

Huberman menyampaikan pola umum analisis menggunakan model interaktif berikut:

a. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018) Reduksi data meliputi merangkum, menentukan unsur-unsur kunci, memusatkan perhatian asal unsur-unsur krusial sesuai topik penelitian, mencari tema serta pola buat memberikan ilustrasi yang logis serta memudahkan pengumpulan data tambahan dengan mereduksi data, anda akan dipandu oleh harapan yang ingin anda capai dan bisa dipengaruhi sebelumnya. Reduksi data pula ialah proses berpikir kritis serta memerlukan kecerdasan serta wawasan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Sehabis data direduksi, langkah selanjutnya artinya menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram serta pictogram menggunakan penyajian data di atas, statistika disusun termasuk versi relasional supaya dapat dipahami. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, penyajian konflik digunakan berbagai macam uraian singkat, bagan, korelasi berbagai macam-macam diagram, serta lain-lain yang sering dipergunakan buat penyajian informasi pada penelitian kualitatif berbentuk teks deskriptif memakai penyajian data ini maka akan terorganisir serta terstruktur sedemikian rupa menjadi akibatnya lebih praktis buat dipahami (Sugiyono,2018).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan menurut Sugiyono (2018) Akibatnya, penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah sejak awal, baik bisa terjawab atau tidak karena sebagaimana sudah disebutkan, perselisihan dan rumusan duduk perkara pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara serta berkembang

seiring berjalannya saat di lapangan. Dampak penelitian kualitatif berarti penemuan-penemuan baru yg belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya mampu berupa gambar atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak terlihat, sebagai akibatnya menjadi terlihat saat pencarian selesai.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menyusunnya menjadi enam bab. Berikut susunan sistematika dari skripsi ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan membahas terkait pengantar dalam penelitian. Pengantar ini terkait dengan latar belakang yang mendorong dilakukan penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini dibagi menjadi dalam pembahasan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian.

BAB II PROGRAM LAYANAN ORANG TERLANTAR DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSON

Dalam bab ini akan membahas uraian teori fungsionalisme struktural Talcott Parson serta uraian mengenai kajian ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai orang terlantar, kota bebas orang terlantar, program PPMKS serta pengentasan orang terlantar seperti kemiskinan secara lebih lanjut.

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN PROFIL DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

Bab ini akan membahas lebih detail terkait gambaran lokasi penelitian. Seperti penjelasan pada judul bahwa kajian ini membahas kota bebas orang terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sehingga pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai orang terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Selain

itu, dikarenakan pekerja sosial ini bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Semarang nantinya akan dibahas juga mengenai gambaran perlindungan serta pelayanan kondisi Dinas sosial Kabupaten Semarang antara lain gambaran umum, kondisi geografis, kondisi demografis, selain itu profil lembaga, struktur kelembagaan dan fungsi dan tugas lembaga

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM PPMKS UNTUK ORANG TERLANTAR DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan kajian mengenai implementasi PPMKS permasalahan orang terlantar yang ditemui dan yang ditangani oleh pekerja sosial.

BAB V DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM PPMKS ORANG TERLANTAR YANG DITERAPKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

Bab ini akan membahas lebih detail terkait temuan penelitian yang berkaitan dengan dampak program PPMKS yang ditangani pekerja sosial dalam penanganan masalah orang terlantar. Temuan mengenai peran dan strategi-strategi tersebut akan dibahas dalam bab ini dan dibagi ke beberapa kategori pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil dan temuan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Secara lebih rinci nantinya dalam pembahasan bab ini akan dibagi ke dalam dua point berikut ini:

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

BAB II

PROGRAM LAYANAN ORANG TERLANTAR DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSON

A. Program Layanan Orang Terlantar, Orang Terlantar dan Program PPMKS

1. Program Layanan Orang Terlantar

a. Pengertian Program Layanan Orang Terlantar

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 “program layanan orang terlantar adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Penanganan masalah PGOT ini juga telah diatur dalam PP No 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penertiban bagi warga yang berprofesi menjadi PGOT. Sebagai wujud tindak lanjut dari penertiban tersebut adalah pelayanan sosial. PGOT yang telah terjaring untuk selanjutnya diberikan penanganan beserta pelayanannya. Bentuk dari pelayanan sosial adalah seperti pemberdayaan bagi PGOT.

Pelayanan sosial itu sendiri adalah bentuk pelayanan yang diberikan baik oleh lembaga-lembaga ataupun instansi dalam rangka membantu dan memperkuat warga yang kurang beruntung atau sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut Alfred J. Khan dalam Ummuhanifah (2015). Suatu bentuk pelayanan berupa program yang diajukan untuk berperan sebagai instrument untuk meningkatkan penyediaan fasilitas, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Selain itu juga untuk menjalankan fungsi-fungsinya, menjangkau pelayanan lebih luas serta dalam rangka memberikan bantuan bagi masyarakat kesulitan dan terlantar disebut pelayanan sosial.

Penyelenggaraan program layanan orang terlantar yaitu penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar melalui panti pelayanan sosial. Panti sosial yang melakukan penanganan PMKS yang berfokus pada pengemis, gelandangan dan orang terlantar akan tetapi, dalam menjalani pelaksanaan program rehabilitasi sosial melalui panti pelayanan PGOT menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis. Dalam pemberian program rehabilitasi sosial ditemukan adanya sebagian besar yang memperoleh program rehabilitasi sosial merupakan kriteria jenis penerima manfaat gelandangan.

Program yang diberikan ini berupa pemberdayaan PGOT dalam hal ini seperti pemberian pelatihan dan ketrampilan. Akan tetapi kendala dalam penanganan yang sampai saat ini masih ada yaitu belum tersedianya shelter atau RPS (Rumah Perlindungan Sosial) masih banyak dinas sosial tidak memiliki shelter. Shelter atau RPS sendiri memiliki pengertian sebagai suatu rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mana di dalamnya para orang terlantar akan diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan. Hal tersebut dalam rangka memberdayakan orang terlantar agar lebih mandiri dan memiliki daya sebelum nantinya kembali ke masyarakat. Shelter atau RPS sendiri memiliki pengertian sebagai suatu rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mana di dalamnya orang terlantar akan diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan. Hal tersebut dalam rangka memberdayakan PGOT agar lebih mandiri dan memiliki daya sebelum nantinya kembali ke masyarakat. Program layanan orang terlantar diharapkan dapat memberikan keberfungsian sosial bagi penerima manfaat orang terlantar salah satunya adalah dapat mandiri dengan berperilaku sesuai kaidah dan norma hukum belaka. Program ini yaitu untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar seperti mandiri, mampu menangani permasalahan sendiri dan berpartisipasi dengan lingkungannya.

2. Orang Terlantar

a. Pengertian Orang Terlantar

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 “ orang terlantar adalah seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus”. Sedangkan menurut Fariz (2023) pengemis, gelandangan orang terlantar (PGOT) adalah orang-orang yang hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan dirinya, norma-norma sosial yang ada serta rendahnya tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 kategori orang terlantar terdiri dari 26 kelompok yaitu anak balita telantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, pengemis, gelandangan, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil.

Munculnya orang terlantar seperti anak jalanan dilatarbelakangi oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian dan faktor luar dari anak jalanan tersebut. Hal ini dibuktikan sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Hal inilah yang merupakan pemicu utama anak melakukan kegiatan di jalanan. Selain itu kondisi tersebut terjadi akibat tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (Diyah,2022). Secara psikologis, anak jalanan adalah anak-anak yang pada suatu taraf tertentu belum memiliki cukup mental dan emosional yang kuat, sementara mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung

berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya (Eny,2022).

Keberadaan orang terlantar menumbuhkan masalah sosial diantaranya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat misalnya yaitu: 1) menjadikan bahu jalan sebagai tempat singgah atau tempat berteduh, 2) kehidupan yang mengganggu ketertiban karena menjadi kumuh, 3) mengemis di perempatan jalan-jalan dan lampu lalu lintas yang menghalangi lalu lintas, 4) meminta makanan pedagang baik di ruko maupun pedagang keliling yang merugikan dan meresahkan pedagang (Nursahidin,2021).

Masalah orang terlantar ini tidak hanya berkaitan tentang kemiskinan, tetapi juga eksploitasi dengan mengirimkan orang terlantar berupa gelandangan dan pengemis di suatu daerah, munculnya orang-orang terlantar juga disebabkan oleh tidak merawat dirinya sendiri dan ketidakmampuan orang terlantar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Program PPMKS

a. Pengertian Program PPMKS

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 “Program PPMKS merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, mutu dan keberlanjutan hidup serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat dengan mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan sosial perkumpulan dengan program yang ditujukan kepada penyandang disabilitas sosial serta masalah perlindungan”.

Program PPMKS meliputi bimbingan sosial dan mental, pelatihan dan keterampilan, bantuan layanan kemiskinan, bantuan diberikan langsung kepada masyarakat miskin dengan berharap dapat meningkatkan kemampuan atau keahlian PPMKS meningkatkan taraf hidup yang layak bagi masyarakat miskin dengan cara berharap dapat meningkatkan kemampuan atau keahlian selain itu juga PPMKS untuk meningkatkan

taraf hidup yang layak. Peran program PPMKS yaitu : 1) meningkatkan keberfungsian sosial PPMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial baik yang berbasis komunitas maupun berbasis panti asuhan untuk bertahan hidup dan mengembangkan, 2) mengembangkan sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial yang komprehensif, 3) meningkatkan kualitas pengelolaan layanan kesejahteraan sosial internal memanfaatkan sumber daya kesejahteraan sosial, 4) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan kesejahteraan sosial, 5) menyusun dan menyelaraskan kebijakan penanganan permasalahan hal-hal strategis yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial, 6) meningkatkan kualitas hidup PPMKS dengan pelayanan dan fasilitas dasar sosial pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial, dan 7) meningkatkan sarana dan prasarana gedung dalam rangka menunjang pelayanan kesejahteraan sosial berbasis rumah yang semakin profesional (peraturan bupati semarang nomor 79 tahun 2022).

Menurut peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia menjelaskan metode rehabilitasi sosial bagi PPMKS dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Rehabilitasi sosial dengan metode tersebut diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut : 1) motivasi dan diagnosis psikososial, 2) perawatan dan pengasuhan, 3) pelatihan kejuruan dan pengembangan kewirausahaan, 4) bimbingan mental spiritual, 5) bimbingan fisik, 6) bimbingan sosial dan 7) konseling psikososial layanan aksesibilitas (fasilitas yang disediakan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan) berupa bantuan dan dukungan sosial dalam panduan resosialisasi bimbingan lebih lanjut dan referensi.

Pemberian berbagai bentuk kegiatan di atas diharapkan dapat membantu percepatan PPMKS mencapai kesejahteraan sosial sehingga pada akhirnya dapat hidup normal seperti manusia pada umumnya.

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan agama. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan rehabilitasi sosial di atas mempunyai arti yang sama pentingnya, terutama pembinaan mental dan spiritual. Perubahan yang terjadi pada orang terlantar dipengaruhi oleh apa yang mereka terima di panti sosial. Begitu pula bagi pemerintah dengan adanya panti sosial tentunya dapat membawa dampak baik bagi para orang terlantar dengan adanya program PPMKS akan mengalami banyak perubahan baik. Oleh karena itu pentingnya peran panti sosial yang ada dalam program PPMKS sangat diperlukan untuk dapat mengembalikan fungsi sosial PPMKS serta mengembalikan orang terlantar dalam kehidupan yang lebih baik (Anandar,Wibhawa & Wiboro, 2015).

B. Teori Fungsionalisme Struktural Menurut Talcott Parsons

1. Asumsi Dasar Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural menurut pemikiran sosiologi modern Talcott Parsons yaitu teori struktural fungsional. Teori ini salah satu peristiwa sosial. Teori struktural-fungsional cenderung memberikan akibat signifikan terhadap ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi pada era modern hingga saat ini. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat ialah salah satu bagian suatu sistem sosial berasal struktur-struktur saling berhubungan dan bekerja sama untuk membentuk keseimbangan. Teori struktural-fungsional lebih menekankan di keteraturan sistem serta struktur. Teori ini memusatkan penelitian satu peristiwa sosial dibandingkan peristiwa sosial lainnya (Ritzer,1985).

Teori struktural-fungsional awalnya dikembangkan oleh Parson lebih sering diklaim sebagai teori integrasi karena berkaitan dengan integrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Unsur masyarakat dalam terpadu mencakup suatu sistem yang mengembangkan di Masyarakat dan berguna dalam menciptakan keseimbangan (Ritzer,1985). Ketika masyarakat ingin menciptakan stabilitas dan keselarasan dalam suatu lingkungan atau organisasi,

tetapi struktur dan sistem terbentuk di dalamnya harus berfungsi. Salah satu tujuan utama teori struktural-fungsional Talcott Parsons adalah membangun ketertiban sosial dalam masyarakat. Teori ini meyakini adanya proses integrasi dalam warga akan berjalan dengan baik sehari-hari bila komponen-komponen atau kesatuan-kesatuan yang terkait bisa menjalankan fungsi serta strukturnya dengan baik. Teori struktural-fungsional memandang empiris sosial menjadi suatu sistem hubungan yaitu suatu sistem sosial yg seimbang serta terintegrasi secara khusus terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung (Ritzer,1985). Jadi bila suatu sistem atau struktur sosial adanya perubahan juga di sistem yang lain. Teori ini mengasumsikan adanya seluruh elemen warga lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu komunitas akan menyebabkan perubahan di komunitas lainnya.

Teori ini mempelajari fungsi terdiri kiprah lembaga sosial atau struktur sosial dalam tindakan sosial tertentu di kalangan rakyat negara serta menelaah pola hubungannya dengan komponen sosial lainnya. Hal ini pembahasannya wacana teori struktural-fungsional Talcott Parsons berkata tentang sistem sosial pada masyarakat terdiri berasal sejumlah agen individu dimana agen individu tersebut berinteraksi dengan individu lain terstruktur pada satu atau lebih organisasi. Parsons memakai teori struktural-fungsionalnya buat memfokuskan penelitiannya mencakup sejumlah sistem dan struktur sosial yang ada dalam warga yang saling mendukung sebagai akibatnya menghasilkan keseimbangan yang dinamis.

a. Adaptation (Adaptasi)

Adaptasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu menyesuaikan diri berkaitan lingkungannya dimana lingkungannya agar kita dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Adaptasi yang terjadi disini menangani adanya masalah sosial yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang terkait orang terlantar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya mereka melakukan mengemis dengan meminta rasa belas kasihan kepada orang lain agar mendapatkan uang

untuk memenuhi kebutuhannya. Serta mereka juga mengandalkan bantuan yang diberikan dari dinas sosial senantiasa untuk masyarakat untuk kembali ketempat asalnya.

b. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mengidentifikasi serta mencapai tujuan utamanya. Dapat kita lihat yang terjadi masalah sosial orang terlantar ini memiliki tujuan tertentu yang apa mereka lakukan yaitu adanya faktor mencari pekerjaan, mencari anggota, pekerjaan pengemis, kehabisan bekal serta adanya terjadinya penipuan mereka melakukan senantiasa untuk memenuhi kebutuhan mereka mencapai kesejahteraan.

c. *Integration* (Integrasi)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mengatur korelasi antar komponennya dan harus mampu mengatur hubungan ketiga fungsi lainnya. (adaptasi, pencapaian tujuan dan latensi) sehingga akan tercipta kesatuan hubungan yang harmonis antar komponen. Dapat kita lihat dalam penelitian ada beberapa faktor yang terlibat dari orang terlantar sebagai pelaku utama dinas sosial sebagai perantara penyelesaian permasalahan serta pemerintah sebagai pemberi bantuan. Bagaimana mereka harus melaraskan menjalankan peran apa yang dibutuhkan orang terlantar maka dinas sosial memberikan suatu layanan perlindungan bantuan sesuai kriteria peraturannya serta pemerintah sebagai koordinasi menyerahkan pelayanan yang diberikan kepada dinas sosial.

d. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, meningkatkan dan melengkapi motivasi individu dan tatanan budaya. Hal ini dinas sosial sebagai peran penting untuk memberikan layanan perlindungan motivasi untuk mereka merubah diri menjadi lebih baik. Layanan yang diberikan dinas sosial berupa panti sosial yang didalamnya

diberikan fasilitas motivasi berupa psikologi, kesehatan, jasmani & rohani, pendidikan serta pemberdayaan ini dapat merubah kehidupan orang terlantar untuk mensejahterahkan kehidupannya.

C. Prespektif Islam tentang Orang Terlantar

Islam tidak mengajarkan insan buat menjadi lemah melainkan pantang menyerah dan membuatkan etos kerja yang tinggi. Islam meyakini bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi dan kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan akhirat saja namun juga kebutuhan dunia. Dia tak bisa mencapai sesuatu karena ia tidak bergerak atau sebab beliau tidak mempunyai kemauan maupun kemampuan buat berkiprah (QS. Al-kahfi:79).

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Terjemahan

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Islam memandang dampak kemiskinan terhadap kehidupan manusia sebagai penyebab terjadinya kejahatan, kelaparan, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Islam sangat membenci kemiskinan oleh sebab itu berdasarkan Islam kemiskinan ialah konflik yang wajib diatasi karena tidak jarang kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak beriman terhadap nikmat Allah. Faktor kemiskinan pula sebagai akar permasalahan pada kehidupan karena saat kemiskinan menghampiri kehidupan seorang, baik yang berafiliasi menggunakan ekonomi maupun spiritualitas agama, maka menghasilkan orang tadi berani melakukan perbuatan buruk kegiatan yang dihentikan sang kepercayaan atau hukum negara. Dalam perspektif sosiologi agama, selain hadir menjadi pembawa perdamaian serta keamanan umatnya, Islam pula hadir menjadi pengkritik kemiskinan bukan sebagai pendukung kemiskinan budaya yang sebagai beban tentang kehidupan seseorang (Ahmad,2020).

Al-Quran juga menganjurkan bekerja sebagai langkah mengatasi kemiskinan. Dimana Tuhan menciptakan bumi, langit dan segala isinya diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan baik agar manusia tidak harus hidup dalam kesengsaraan. Untuk mengentaskan kemiskinan, sosiologi keyakinan menawarkan solusi bagi setiap manusia dengan menjadikan keyakinan sebagai pedoman dalam hidupnya karena semua agama mengajarkan pemeluknya untuk berusaha mencegah rasa malas. Kepercayaan mendorong pandangan hidup yang bekerja, sehingga warga negara wajib berperan dalam pengentasan kemiskinan dimulai dari diri mereka sendiri. Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai pembahasan mengenai kemalasan, pemborosan atau rakus(Lukman,2020). Kita bisa melihat cara sosiologi agama menerapkan bidang pengentasan kemiskinan. Sosiologi agama meneliti segala permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, bahkan agama untuk dijadikan pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupannya.

Pengentasan kemiskinan harus membantu meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dengan melatih generasi muda untuk memperoleh keterampilan. Pemerintah harus tegas dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat lebih produktif melalui dukungan finansial yang diberikan tidak hanya sebatas sumbangan pangan tetapi juga kewirausahaan dan investasi agar tidak membuat masyarakat bergantung pada dana bantuan eksklusif. Masyarakat harus berupaya mencapai produktivitas dan meninggalkan nilai-nilai budaya yang buruk. Masyarakat miskin juga harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan agar mereka bebas berinovasi (Prawoto,2008). Serta yang terpenting, pemerintah, lembaga pemberdayaan dan masyarakat bisa saling bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN PROFIL DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

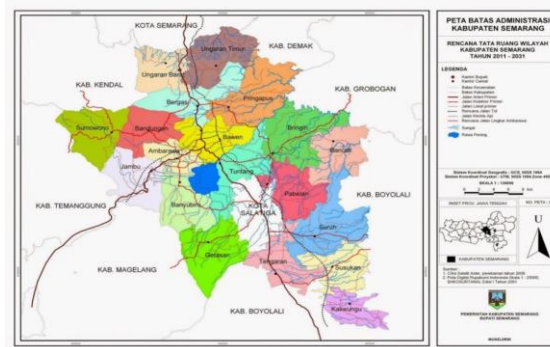
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

1. Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54.75''$ – $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ – $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah 31 seluas 95.020.674 Ha. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini dimungkinkan karena jika dilihat dari ketinggian wilayahnya dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter di atas permukaan laut hingga 1.450 di atas permukaan laut. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi.

Wilayah Kabupaten Semarang mempunyai luas 950,21 Km² (95.020.674 Ha), terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Jumlah Satuan Lingkungan Hidup Setempat (SLS) pada tahun 2015 untuk jumlah Rukun Warga (RW) adalah 1.565 mengalami penurunan sebanyak 14 RW dibandingkan tahun 2014 (1.579), hal ini disebabkan adanya penataan ulang penomoran dan penggabungan RW di beberapa kecamatan.

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031)

Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Batas Kabupaten Semarang berada di sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar antara 500 – 2000 m di atas permukaan laut (dpl) dengan ketinggian terendah terletak di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan.

Curah hujan rata-rata sebesar 1.979 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai antara lain : Gunung Ungaran, letaknya meliputi Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono. Gunung Telomoyo terletak di Kecamatan Banyubiru, Getasan. Gunung Merbabu terletak di kecamatan Getasan dan Tenganan. Pegunungan Sewakul terletak di Kecamatan Ungaran. Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kecamatan Ungaran. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di Kecamatan Pabelan. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di Kecamatan Suruh. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kecamatan Tuntang. Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kecamatan Tenganan. Pegunungan Pungkruk terletak di

Kecamatan Bringin. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kecamatan Bergas. Sungai/kali dan danau/rawa di Kab.Semarang diantaranya:

- a. Kaligarang, yang melalui sebagian wilayah Kec.Ungaran dan Bergas.
- b. Rawa Pening meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Getasan.
- c. Kali Tuntang, yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen.
- d. Kali Senjoyo, melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, Tngaran dan Getasan.

2. Kondisi Topografis Kabupaten Semarang

Menurut data BPS Kabupaten Semarang 2023 keadaan topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu ;

- a. wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 – 2% seluas 6.169 Ha.
- b. wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2 – 15% seluas 57.659Ha.
- c. wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 – 40% seluas 21.725 Ha.
- d. wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 Ha.

Ungaran ibu kota kabupaten ini, tepat berbatasan dengan Kota Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran tinggi dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah Sungai Tuntang. Di bagian barat wilayahnya berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ungaran (2.050 meter) di perbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta Gunung Merbabu (3.141 meter) di baratdaya.

Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan Surakarta dan Jogja dengan Kota Semarang atau lebih dikenal dengan "JOGLO SEMAR". Angkutan umum antar kota dilayani dengan bus, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, dan Ambarawa. Beberapa rute angkutan regional adalah: Semarang-Surakarta, Semarang-Jogja, dan Semarang-Purwokerto, sedang rute angkutan lokal adalah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga, Salatiga-Ambarawa.

Bawen merupakan kota persimpangan jalur menuju Surakarta dan menuju Yogyakarta, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Banjarnegara, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Ciamis, Tasikmalaya, Garut hingga Bandung. Jalur keretaapi Semarang-Yogyakarta merupakan salah satu yang tertua di Indonesia, namun saat ini tidak lagi dioperasikan, sejak meletusnya Gunung Merapi yang merusakkan sebagian jalur tersebut. Jalur lain yang kini juga tidak beroperasi adalah Ambarawa-Tuntang-Kedungjati. Di Ambarawa terdapat Museum Kereta Api. Kereta api uap dengan rel bergerigi kini digunakan sebagai jalur wisata dengan rute Ambarawa-Bedono di samping itu telah dikembangkan kereta wisata Ambarawa-Tuntang PP dengan menyusuri tepian Rawapening. Kota Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang, berada di jalur utama Semarang-Surakarta.

3. **Kondisi Demografi**

Menurut data tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan sepuluh tahun sekali yakni Sensus Penduduk 2023 (SP2020). Pada tahun 2023 secara administratif Kabupaten Semarang memiliki 9 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sebanyak 1 080 648 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 dibanding tahun 2022 yakni 0,77%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Semarang terdapat 542.531 jiwa. Jumlahnya melebihi penduduk laki-laki yang berjumlah 538.117 jiwa.

Akumulasi jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa angka *sex ratio* Kabupaten Semarang berada di bawah 100%. Namun terdapat beberapa kecamatan dengan angka *sex ratio* di atas 100%. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Semarang berjumlah 1.040 orang/km². Terdapat tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni Kecamatan Ambarawa dengan 2.147 orang/km², Ungaran Barat dengan 1.667 orang/km² serta Kecamatan Bergas dengan tingkat kepadatan 1.666 orang/km².

**Tabel 3. 1Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2023**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Getasan	27.128	26.792
Tenggaran	36.709	36.949
Susukan	25.640	25.421
Kaliwungu	15.402	15.861
Suruh	36.639	36.069
Pabelan	23.115	23.209
Tuntang	35.011	35.587
Banyubiru	22.666	22.426
Jambu	20.803	20.687
Sumowono	17.599	17.367
Ambarawa	32.187	32.581
Bandungan	30.167	30.003
Bawen	30.505	30.396

Bringin	23.893	23.780
Bancak	12.477	12.480
Pringapus	28.585	29.892
Bergas	37.876	39.708
Ungaran Barat	40.694	41.696
Ungaran Timur	41.021	41.627
Kabupaten Semarang	538.117	542.531

Sumber: Kabupaten Semarang Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Semarang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa) Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	2020
SD/Sederajat	201.683
SMP/Sederajat	213.881
SMA/Sederajat	114.539
Perguruan Tinggi	34.198

Sumber: BPS Kabupaten Semarang 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan mayoritas atau rata-rata penduduk masyarakat Kabupaten Semarang adalah lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan jumlah total 213.881 orang. Serta diikuti SD (Sekolah Dasar) berjumlah 201.683 orang, lalu SMA (Sekolah menengah atas) berjumlah 114.539 orang. kemudian perguruan tinggi yang berjumlah 34.198. Kemudian maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Semarang memiliki tingkat pendidikan yang masih terbilang rendah.

Adapun untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2021

No.	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Wirausaha	52.571	44.698	97.269
2.	Buruh (tidak tetap)	49.720	31.241	80.961
3.	Buruh (tetap)	12.785	3.346	16.131
4.	Karyawan/Pegawai	141.380	122.778	264.158
5.	Pekerja bebas di pertanian	11.671	4.715	16.386
6.	Pekerjaan bebas di Nonpertanian	46.448	6.122	52.570
6.	Pekerja rumah tangga	19.530	51.408	70.938
	Total	334.105	264.308	598.413

Sumber: BPS Kabupaten Semarang Tahun 2021

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk masyarakat Kabupaten Semarang bekerja sebagai karyawan atau pegawai dengan jumlah total 264.158orang, kemudian diikuti dengan penduduk masyarakat yang ber-wirausaha secara mandiri dengan jumlah total 97.269orang.

Penduduk masyarakat Kabupaten Semarang menganut agama atau keyakinan yang beragam, mulai dari agama islam, kristen, khatolik, hindu, budha, khong hucu dan lainnya. Jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Semarang berdasarkan agama atau keyakinan dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Keyakinan (Jiwa) Tahun 2022

No.	Agama/Keyakinan	Jumlah
1.	Islam	1.004.313
2.	Kristen	33.853
3.	Khatolik	22 858

4.	Budha	4.395
5.	Hindu	232
6.	Khong hucu	32
7.	Lainnya	629
	Total	1.066.312

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang
Tahun 2022**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk masyarakat Kabupaten Semarang memeluk atau menganut agama islam dengan jumlah total 1.004.313orang. Sedangkan pemeluk agama atau keyakinan lainnya adalah penduduk masyarakat yang paling sedikit dengan total 629 orang. Meskipun penduduk masyarakat Kabupaten Semarang menganut agama yang beragam, penduduk masyarakat Kabupaten Semarang tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan data yang diperoleh terkait PPMKS berbagai kategori orang terlantar di Kabupaten Semarang berdasarkan kecamatan, jumlah PPMKS di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.271 Jiwa (BPS Kabupaten Semarang, 2022). Artinya hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 7,17 % penyandang PPMKS di Kabupaten Semarang dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Semarang yang sebanyak 1.068.492 Jiwa (BPS Kabupaten Semarang 2022).

Tabel 3. 5 PPMKS Berdasarkan Kategori di Kabupaten Semarang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Anak Terlantar	159	10,07
2.	LanjutUsia Terlantar	325	51,38
3.	gelandangan	34	100
4.	Pemulung	57	100
5.	Korbanbencana alam	153	100
6.	Disabilitas	543	16,39

	Total	1.271	100
--	-------	-------	-----

Sumber: BPS Kabupaten Semarang Tahun 2022

Jumlah penyandang PPMKS tertinggi di Kabupaten Semarang kategori disabilitas sebesar 16,39% atau sebanyak 543 jiwa dari 1.271 jiwa, sedangkan jumlah penyandang PPMKS terkecil kategori gelandangan sebesar 100% atau sebanyak 34 jiwa. Tinggi dan rendahnya jumlah penyandang PPMKS tersebut selaras dengan penduduk Kabupaten Semarang yang tinggi tanpa disadari permasalahan PPMKS ini juga dari faktor orang luar yang terlantar tanpa disengaja.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi Perekonomian Kabupaten Semarang pada tahun 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 56.632,20 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 37.857,92 miliar. Perekonomian Kabupaten Semarang pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang tumbuh 3,63 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 65,21 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 6,28 persen. Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 39,11 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 58,66 persen (BPS Kabupaten Semarang, 2022).

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Tumbuh 5,31%



Sumer : BPS Kabupaten Semarang 2022

5. Kondisi Kesehatan

Kebutuhan dasar hidup manusia adalah pelayanan di bidang kesehatan yakni tersedianya fasilitas kesehatan yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama, maka keberadaan puskesmas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (Kurniawan & Intiasari, 2012).

Tabel 3. 6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Semarang Tahun 2022

NO	Kecamatan	Banyak fasilitas Kesehatan		
		Rumah sakit umum	Puskesmas	Puskesmas pembantu
1.	Getasan		2	4
2.	Tengaran		1	5
3.	Susukan		1	4
4.	Kaliwungu		1	3
5.	Suruh		2	5
6.	Pabelan		2	7
7.	Tuntang		2	3
8.	Banyubiru		1	3
9.	Jambu		1	3
10.	Sumowono		1	5
11.	Ambarawa	2	1	2
12.	Bandungan		2	2
13.	Bawen		1	2

14.	Bringin		1	4
15.	Bancak		1	3
16.	Pringapus		1	4
17.	Bergas	1	1	4
18.	Ungaran barat	1	2	2
19.	Ungaran timur	1	2	3
Jumlah 2022		5	26	68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2022

Pada wilayah Kabupaten Semarang saat ini telah terdapat rumah sakit sebanyak 5 unit, puskesmas 26 unit dan puskesmas pembantu 68 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah orang sakit menjadi ukuran pemenuhan kesehatan di suatu daerah. Data ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan pembangunan pendidikan berdasarkan kesehatan maupun lapisan masyarakat aksesibel terhadap layanan kesehatan yang mudah, murah dan merata. Semakin tinggi angka kesakitan menunjukkan semakin rendah derajat kesehatan masyarakat. Jumlah orang sakit pada tahun 2022 sebesar 17,32%, yang artinya terdapat sekitar 17% penduduk Kabupaten Semarang yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu dalam melakukan kegiatan secara normal. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya yakni sebesar 18,62% (Rosiyanti, 2021).

B. Dinas Sosial Kabupaten Semarang

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Gambar 3.3 Dinas Sosial Kabupaten Semarang



Pemerintah kabupaten dan kota memiliki lembaga turunan Kementerian Sosial bernama dinas sosial jadi pelaksana kebijakan pemerintah kabupaten dan kota di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Garis pertanggungjawaban kepala dinas ke sekretaris daerah dan bupati. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Semarang adalah melakukan pengembangan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk masyarakat. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan teknis untuk diimplementasikan pada bidang sosial
- b. Memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sosial.
- c. Membina dan melaksanakan tugas menyelesaikan permasalahan di bidang sosial
- d. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh sekda atau bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

a. Visi:

Terwujudnya kesejahteraan sosial oleh dan untuk masyarakat Kabupaten Semarang

b. Misi:

- a. Mencegah, mengendalikan, dan mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Menumbuhkan, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administrasi Dinas.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dalam tugas dan Fungsinya Dinsos di antaranya sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan kemampuan, kesadaran dan tanggungjawab masyarakat atas kebutuhan kesejateraan hidup dan peka terhadap problematika sosial yang berlangsung.
- b. Meningkatkan profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat dengan mencanangkan pengembangan yang efektif dan efesien bagi pekerja sosial dalam intervensi bidang kesejateraan sosial di masyarakat.
- c. Melindungi masyarakat dari yang terdampak pembangunan dan perubahan sosial.
- d. Tersedianya data dan informasi untuk diakses oleh publik.
- e. Meningkatkan fungsi dan menjaga jaringan kelembagaan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan membentuk kolektif antar Lembaga.

4. Nilai Dasar Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki beberapa nilai dasar dalam menjalankan programnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengarus utamaan gender (PUG) untuk menyelaraskan pembangunan yang sadar akan nilai-nilai kesetaraan gender.
- b. Memiliki nilai efektif, efesien dan akuntabel dalam mengelola pemerintahan guna mendukung kinerja dan pembangunan di Dinas Sosial.
- c. Pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kepekaan terhadap kehidupan ekonomi sosial dan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan dari generasi sekarang ke yang akan datang.
- d. Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim yang bertumpu pada usaha preventif dan sigap dalam penangan bencana yang disebabkan oleh iklim dan meningkatkan perubahan gaya hidup dengan penggunaan rendah karbon
- e. Membangun arus utama modal sosial budaya untuk modal pembangunan dan menggerakkan ekonomi penduduk.
- f. Transformasi digital sebagai respon terhadap pesatnya teknologi yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

5. Implementasi Program Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Berikut beberapa implementasi dari Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang di antaranya sebagai berikut:

a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program RTLH sebagai respon pemenuhan hak penduduk atas rumah layak huni. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten akan membangun rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan, kesehatan dan minimum luasnya.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang

Problematika sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengembalikan orang pada kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilandasi melayani warga negara dengan tenggat waktu singkat. Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

c. Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam

Pelayanan terhadap korban bencana alam dilakukan oleh dinas sosial sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap perorangan maupun komunal. dinas sosial bekerjasama layanan kesehatan untuk menanggulangi keselamatan fisik, mental dan sosial akibat bencana yang terjadi. Layanan yang diberikan oleh dinas sosial berupa perlindungan sosial dan psikososial dari bencana yang *unpredictable*.

d. Pelayanan Anak Terlantar

Dinas Sosial memiliki program pelayanan terhadap anak terlantar untuk mendapatkan jaminan sosial. Kategori anak disesuaikan dengan ketentuan aturan yang mensyaratkan usia belum mencapai 18 tahun. Anak terlantar disebabkan banyak faktor, antara lain: kemiskinan, salah seorang dari orang tua atau wali sakit, salah seorang atau kedua orang tua atau wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh. Faktor-

faktor tersebut menjadi gambaran hak kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

e. Pelayanan Lansia Terlantar

Dinas sosial memiliki program melayani pelayanan terhadap lansia yang terlantar untuk diberikan pemenuhan hak sosial berupa perlindungan dan jaminan sosial. Syarat mendapatkan pelayanan dinas sosial adalah lansia dengan usia minimum 60 tahun dengan keadaan keterbatasan fisik yang berakibat pada ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan hidup. Jaminan sosial dibutuhkan oleh lansia untuk kebutuhan primernya.

f. Pelayanan Difabel

Dinas sosial memberikan layanan kepada difabel yang memiliki kemampuan berbeda berupa fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu lama. Negara diperlukan hadir untuk pemenuhan kesetaraan dalam melayani warga negara. Macam-macam difabel di atas diperbolehkan mendapatkan layanan rehabilitasi berbasis keluarga, masyarakat maupun panti.

g. Pemberdayaan PSKS

Dinas Sosial memiliki program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) baik perorangan maupun kelompok. Ragam PSKS yang ditangani oleh dinas sosial bertujuan meningkatnya kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya.

h. Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak

Menerima laporan atas kejadian kekerasan terhadap anak untuk dilakukan pendampingan bersama pekerja sosial dan bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya dalam menangani masalah tersebut. Sehingga anak dapat menjalani program resosialisasi dalam kehidupannya.

6. Kelompok Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Kemudian terkait pelaksanaan program ada beberapa kelompok sasaran di antaranya berikut ini:

a. Pemenuhan hak-hak untuk tumbuh-kembang

- b. Anak-anak terlindungi agar tindakan kekerasan, eksploitasi dan Perlakuan salah lainnya.
- c. Aksesibilitas pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia dan difabel.
- d. Peningkatan kemampuan difabel agar mampu berperan menjadi manusia yang setara.
- e. Memenuhi hak-hak difabel
- f. Pembentukan kemandirian fakir miskin dan kelompok rentan menjadi sumber daya produktif.
- g. Tenaga-tenaga terdidik dan terlatih semakin efisien dalam menyelenggarakan pelayanan sosial
- h. Ketersediaan dan keterbukaan informasi tentang kesejahteraan sosial

7. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Kebijakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang di antaranya berikut ini:

- a. Pengembangan sistem bantuan untuk jaminan sosial PMKS dengan pelibatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- b. Pembangunan ketahanan sosial dengan pelibatan anak muda untuk mencegah bencana alam dan bencana kesehatan.
- c. Mengapresiasi lansia dengan memberikan ruang untuk berekspresi.
- d. Peningkatan kepedulian terhadap difabel dan kelompok rentan dengan mendorong dunia usaha menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e. Memelihara nilai-nilai kesetiakawanan sosial serta kepahlawanan
- f. Internalisasi kepahlawanan, perintis dan kesetiakawanan sosial antar masyarakat.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM PPMKS UNTUK ORANG TERLANTAR DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

Implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang berkerja sama dengan UPTD Among Jiwo memberikan program yang berkaitan dengan rehabilitasi seperti perencanaan, sosialisasi dan pelaksanaan selain itu didalam UPTD Among Jiwo diberikan berupa layananan sosial, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan, jaminan sosial dan reintegrasi masyarakat. Program yang bekerja sama dengan Dinas sosial Kabupaten Semarang bersama UPTD Among Jiwo senantiasa keluar dari rehabilitasi menjadi pribadi yang lebih baik.

A. Implementasi Program PPMKS Kabupaten Semarang

Implementasi program PPMKS adalah proses konkrit dari rencana dan program yang telah dirumuskan untuk memberikan perundangan pemberdayaan, layanan, kesehatan, rehabilitasi, pemulihan serta bantuan sosial kepada orang terlantar dalam kondisi disuatu wilayah atau kota.

Implementasi program PPMKS merupakan tahap penting, dimana implementasi ini dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu program jika suatu program dapat dilakukan dengan baik, maka program ini dapat dikatakan berhasil. Jika sebaliknya, maka diperlukan evaluasi agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.

Pelaksanaan program penanganan orang terlantar yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal ini yang menangani penjarangan orang terlantar. Sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui penyediaan rehabilitasi sosial. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga berkerja sama dengan Dinas Kependudukan terkait melakukan assesment identitas tempat tinggal.

Program PPMKS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus, mengalami permasalahan sosial dan rentan mengalami masalah sosial lainnya salah satunya adalah orang terlantar. Program PPMKS di prioritaskan bagi orang terlantar yang ditemukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan meminta bantuan pertolongan. Implementasi program PPMKS berupa bantuan kesehatan, tempat tinggal, pangan, pendidikan, ketrampilan, kesejahteraan sosial, psikososial dan perlindungan.

Program PPMKS dijalankan oleh dinas sosial melalui berbagai prosedur tertentu. Mulai dari melacak identitas orang terlantar seperti mengidentifikasi KTP, mengapa mereka terlantar, serta orang terlantar ini akan dipulangkan atau di rehabilitasi. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Semarang ini bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Sosial Kota Semarang terkait program pelayanan PPMKS yang dilakukan. Tentang temuan lapangan terlihat dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang melalui bagian rehabilitasi sosial yang bertugas melaksanakan program PPMKS bagi orang terlantar dengan tujuan adanya program PPMKS terhadap orang terlantar pemerintah hadir serta melayani melaksanakan tugas dengan mengurangi jumlah orang terlantar di jalanan dan meminimalisir orang terlantar. Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Semarang berupa langkah preventif dan upaya represif, rehabilitasi, perlindungan dan motivasi. Sebuah langkah dalam implementasi program PPMKS untuk mencapai tujuan keberhasilan implementasi program PPMKS. Keberhasilan implementasi program PPMKS dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perencanaan

Implementasi program PPMKS merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu orang-orang terlantar agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Perencanaan implementasi program PPMKS melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan orang terlantar merupakan langkah kunci dalam merancang program perlindungan dan pemberdayaan bagi populasi yang berada dalam kondisi terlantar. Berikut adalah langkah-langkah dalam merencanakan analisis kebutuhan orang terlantar:

1. Pengumpulan Data Pendahuluan

Mengumpulkan data awal tentang jumlah, karakteristik demografis dan kondisi orang terlantar di wilayah atau komunitas tertentu. Data ini dapat diperoleh dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, survei lapangan atau sumber data lainnya.

2. Identifikasi Kebutuhan Primer

Mengidentifikasi kebutuhan primer orang terlantar, seperti kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

3. Analisis Kebutuhan Kesehatan

Menganalisis keadaan kesehatan orang terlantar, termasuk penyakit yang umum, masalah kesehatan mental, kebutuhan obat-obatan dan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

4. Penilaian Kebutuhan Keterampilan dan Pendidikan

Mengevaluasi keterampilan dan tingkat pendidikan orang terlantar, serta mengidentifikasi peluang untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

5. Analisis Kebutuhan Pemulihan Sosial

Menganalisis masalah sosial dan psikososial yang dihadapi oleh orang terlantar, seperti stigmatisme, isolasi sosial, kehilangan harga diri dan trauma, serta merencanakan program pemulihan yang sesuai.

6. Pemetaan Sumber Daya yang Tersedia

Mengidentifikasi sumber daya yang sudah ada termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, fasilitas kesehatan dan program bantuan sosial lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang terlantar.

7. Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat

Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal, organisasi masyarakat dan kelompok terkait lainnya dalam proses analisis kebutuhan, sehingga memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan nyata.

8. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup strategi, kegiatan, anggaran dan jadwal waktu untuk melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan orang terlantar.

9. Pemantauan dan Evaluasi

Menetapkan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan serta evaluasi untuk mengukur efektivitas dan dampak dari program yang direncanakan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan temuan evaluasi. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo sebagai berikut:

“ UPTD Among Jiwo ini sudah melakukan beberapa tahap pengecekan kondisi fisik dapat mengetahui kebutuhan yang diharapkan melalui tempat layak bagi mereka, makan, kesehatan, pakaian, kesehatan mental, obat-obatan dan kegiatan lainnya ditanggung oleh pemerintah.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

Dengan melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, program perlindungan dan pemberdayaan bagi orang terlantar dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka secara holistik dan berkelanjutan.

b. Pengembangan Program

Pengembangan yang diberikan dalam merancang program yang sesuai untuk membantu orang-orang terlantar termasuk penanganan kesehatan, pemberian pelatihan keterampilan, pembinaan psikologis dan bantuan sosial lainnya. Pengembang program terhadap implementasi program

PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan memberikan rehabilitasi salah satunya di UPTD Among Jiwo dengan merawat serta membantu orang terlantar memberikan berbagai pelayanan sosial dari segi kesehatan, pelatihan, jasmani dan rohani, pemenuhan kebutuhan makan dan mandi, kebutuhan obat-obatan serta bantuan sosial melalui masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo sebagai berikut:

“Program yang diberikan UPTD Among Jiwo berdasarkan program PPMKS dengan memberikan berbagai kebutuhan pangan, kesehatan yang dilakukan dua minggu sekali, pelatihan pemberdayaan, pelatihan kemandirian, jiwa kepedulian, psikologi serta obat-obatan yang dibutuhkan serta UPTD Among Jiwo tidak menerima bantuan berupa uang melainkan bantuan berupa sembako bahan pangan.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

c. Kolaborasi

Kolaborasi dengan pihak terkait dapat melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, LSM dan organisasi relawan untuk mendukung implementasi program dan memperluas jangkauan bantuan. Pemerintah ini memberikan *shelter* atau panti sosial sebagai upaya rehabilitasi orang terlantar dengan tujuan ketika mereka keluar dari panti sosial menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu program PPMKS berkerja sama dengan Puskesmas Ngaliyan untuk memberikan pengecekan kesehatan orang terlantar di UPTD Among Jiwo.

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dapat dilihat dengan sumber daya, menentukan anggaran, tenaga kerja, dan sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan program dengan efektif. Anggaran ini diberikan melalui pemerintah yaitu anggran APBD pemerintah meliputi sarana prasarana fasilitas panti serta dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan orang terlantar.

Perencanaan implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal dalam membantu

orang-orang terlantar. Selain itu terdapat penemuan lapangan dalam perencanaan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang ada di Among Jiwo dapat dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu program.

2. Sosialisasi

Sosialisasi implementasi program PPMKS untuk orang terlantar di Kabupaten Semarang merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat dan prosedur pelaksanaan program tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam sosialisasi tersebut:

a. Pertemuan Komunitas

Mengadakan pertemuan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam relawan orang terlantar, seperti komunitas masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Pertemuan ini bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan secara rinci tentang program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang komunitas ini diberikan edukasi mengenai peduli terhadap orang terlantar.

b. Kampanye Edukasi

Kampanye edukasi program PPMKS Kabupaten Semarang berkaitan dengan permasalahan sosial dapat dilakukan kampanye edukasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang terhadap permasalahan sosial hal ini dilakukan sosialisasi melalui tempat-tempat umum, seperti pasar tradisional, terminal dan area publik lainnya. Kampanye ini dapat dilakukan melalui pembagian brosur, pamflet dan poster yang menjelaskan tentang program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan cara partisipasi terhadap orang terlantar agar mereka juga peduli disekeliling sosial seperti halnya masalah orang terlantar.

c. Pelatihan dan Workshop

Mengadakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat terkait penanganan orang terlantar dengan mengenalkan tanda-tanda orang terlantar yang membutuhkan bantuan, prosedur pelaporan dan cara memberikan pertolongan pertama dapat diarahkan melalui lapor kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

d. Media Sosial dan Website

Memanfaatkan media sosial dan website resmi Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk menyebarkan informasi tentang program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada masyarakat secara luas. Konten-konten informatif seperti video, infografis dan artikel juga dapat dibagikan melalui platform-platform online.

e. Sosialisasi melalui radio lokal

Menggunakan siaran radio lokal untuk menyampaikan informasi tentang program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada masyarakat. Siaran ini dapat mencakup diskusi, wawancara dengan narasumber terkait dan pengumuman tentang kegiatan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang melalui sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dari yang diharapkan masyarakat Kabupaten Semarang dapat memahami pentingnya program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam menangani orang terlantar dan turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi mereka. Selain itu menciptakan lingkungan sosial yang tenang dan nyaman bagi kehidupan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan program PPMKS untuk orang terlantar di Kabupaten Semarang melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan konkret untuk memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada orang terlantar. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pelaksanaannya:

a. Identifikasi dan Pencatatan Orang Terlantar

Dilakukan peran implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam melakukan identifikasi dan pencatatan terhadap kondisi orang terlantar di berbagai wilayah kabupaten Semarang dengan melalui identitas. Hal ini dilakukan melalui survei lapangan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“ Indetifikasi orang terlantar ini sering ditemukan oleh pihak kepolisian dimana mengeluarkan surat terlantar dari kepolisian kemudian dilakukan assesment oleh peksos melalui identitasnya kemudian akan dihubungkan dengan daerah asalnya.” (wawancara Peksos Dinsos Kab Semarang, 2024).

b. Pelayanan Dasar

Memberikan pelayanan kepada orang terlantar, seperti pemberian makanan, pakaian, tempat perlindungan sementara dan akses ke layanan kesehatan dasar. Hal ini diberikan melalui panti sosial salah satunya UPTD Among Jiwo. Dalam hal ini, dinas sosial bekerja sama dengan lembaga atau organisasi non-pemerintah serta relawan untuk menyediakan bantuan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo sebagai berikut:

“ Pemerintah sudah menyediakan pelayanan kepada orang terlantar berupa tempat tinggal, bahan makanan obat-obatan, pakaian, kesehatan, jasmani dan Rohani, psikolog dan fasilitas lainnya. hal ini sudah diberikan penerima sebagai manfaat fasilitas rehabilitasi.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

c. Rehabilitasi dan Pembinaan

Salah satu Upaya yang dilakukan yaitu rehabilitasi dan pembinaan kepada orang terlantar dapat kembali mandiri secara sosial dan ekonomi. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta pemberian akses ke pekerjaan atau peluang usaha. Kegiatan selama rehabilitasi ini dilakukan setiap harinya agar menjadikan orang terlantar menjadi disiplin, lebih baik dan

menumbuhkan jiwa sosial tinggi agar mereka keluar dari rehabilitasi menjadi pribadi yang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“ Orang terlantar jika identitas belum jelas akan dilakukan adanya rehabilitasi hal ini dilakukan salah satunya efek jera bagi mereka, selain itu rehabilitasi ini didalamnya diberikan pembekalan pemberdayaan serta kegiatan sehari-hari yang sudah diatur program PPMKS diberikan kepada orang terlantar senantiasa mereka keluar dari rehabilitasi ini menjadi pribadi yang lebih baik.” (wawancara Peksos Dinsos Kab Semarang, 2024).

d. Reintegrasi Ke Masyarakat

Upaya reintegrasi orang terlantar ke dalam masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Dinas Sosial Kabupaten Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu keluarga, komunitas dan pemerintah setempat untuk memfasilitasi reintegrasi tersebut dengan memberikan dukungan sosial dan ekonomi.

e. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk orang terlantar guna memastikan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang dilakukan dengan cara mengevaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian target, mengevaluasi kebutuhan baru, serta mengevaluasi dampak dari program tersebut terhadap kesejahteraan orang terlantar dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pelaksanaan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua masyarakat termasuk orang terlantar untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang layak. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang lebih baik. Bentuk program PPMKS untuk orang terlantar di Kabupaten Semarang mencakup langkah-langkah awal yang dilakukan untuk mempersiapkan

implementasi program PPMKS secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa langkah pendahuluan yang dapat dilakukan:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Menetapkan tujuan dan sasaran program PPMKS yang jelas dan spesifik, yang mencakup parameter-parameter seperti jumlah orang terlantar yang akan dilayani, tingkat pemulihan yang diharapkan dan indikator keberhasilan lainnya. Program PPMKS ini berkerja sama dengan rehabilitasi UPTD Among jiwo mengenai banyak yang mengalami tingkat pemulihan dipindahkan melalui rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang lebih memadai dan lengkap fasilitasnya. Selain itu juga ada penerima manfaat yang dikembalikan oleh keluarganya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo sebagai berikut:

“ UPTD Among Jiwo ini mayoritas ODGJ terlantar sudah banyak mereka yang mengalami tingkat pemulihan yang dipindahkan dari provinsi yang lebih layak dan besar serta ada juga yang sudah di pulangkan ke daerah asalnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan Dinas Sosial asal orang terlantar. Selain itu juga ada yang dikembalikan kepada keluarganya.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

2. Perencanaan Program

Perencanaan dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan merancang rencana program yang mencakup strategi, kegiatan, anggaran, alokasi sumber daya manusia dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan efektif dan efisien.

3. Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat

Program PPMKS ini berkaitan permasalahan sosial dengan program PPMKS berupa bantuan apa saja yang diberikan program ini serta melakukan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

4. Pembentukan Tim Pelaksana

Pembentukan tim pelaksana program yang terdiri dari berbagai tim lapangan, termasuk perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan komunitas setempat untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan program dengan baik.

5. Penyusunan Rencana Komunikasi dan Sosialisasi

Menyusun rencana komunikasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada masyarakat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka serta membangun dukungan yang luas terhadap program tersebut.

Langkah-langkah pendahuluan ini merupakan tahapan awal yang penting dalam mempersiapkan implementasi program PPMKS untuk orang terlantar di Kabupaten Semarang. Dilakukan dengan persiapan matang diharapkan program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa bentuk program PPMKS yang umum diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Semarang:

- a. Pusat layanan sosial ini menyediakan tempat perlindungan sementara, layanan kesehatan dasar, bantuan pangan dan pakaian bagi orang terlantar.
- b. Program rehabilitasi keterampilan dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian atau keterampilan lainnya untuk membantu orang terlantar meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha mandiri.
- c. Pendampingan sosial dapat menyediakan pendampingan sosial bagi orang terlantar untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, sosial dan ekonomi yang dihadapi serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

- d. Reintegrasi ke masyarakat dengan melakukan program reintegrasi sosial untuk mengembalikan orang terlantar ke dalam masyarakat dengan memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan.
- e. Program jaminan sosial dengan menyediakan program jaminan sosial seperti akses ke layanan kesehatan, bantuan keuangan dan perlindungan sosial lainnya untuk memastikan bahwa orang terlantar mendapatkan perlindungan yang memadai.
- f. Pendidikan dan pelatihan kesehatan memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang kesehatan dan sanitasi kepada orang terlantar untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan.
- g. Kampanye kesadaran masyarakat adanya mengadakan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap kondisi orang terlantar serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka.
- h. Program bantuan langsung ini memberikan bantuan langsung berupa pangan, pakaian, obat-obatan atau kebutuhan dasar lainnya kepada orang terlantar yang membutuhkan.

Itulah beberapa bentuk program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang umum diimplementasikan untuk membantu orang terlantar dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada mereka agar dapat hidup secara mandiri dan bermartabat di kehidupan masyarakat. Adapun implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang diterapkan kepada berbagai kategori orang terlantar dengan adanya rehabilitasi serta bantuan pemerintah kepada masyarakat terlantar antar lain:

a. Shelter

Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Semarang salah satunya memiliki bentuk program rehabilitasi yaitu panti sosial atau *shelter*. Dari sini

Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kota Semarang. Penelitian ini dikaji melalui Dinas Sosial kota Semarang yang memiliki *shelter* yang bernama UPTD Among Jiwo. *Shelter* ini sebagai tempat *shelter* orang terlantar ditempati berbagai kategori gelandangan, anak terlantar, pengemis serta mayoritas ODGJ terlantar. Di dalam rehabilitasi ini kategori orang terlantar memiliki ruang sendiri. Selain itu juga rehabilitasi ini sebagai tempat *shelter* atau rujukan orang terlantar hanya bisa menginap 7 hari sampai 10 hari lalu dipindahkan di Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah, tetapi kenyataannya Panti Provinsi Jawa Tengah koutanya penuh. Selain itu juga untuk dirujuk ke Panti Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai syarat. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo sebagai berikut:

” Bahwa di UPTD Among Jiwo ini hanya memiliki kapasitas 40 orang tetapi kenyataannya 70 orang yang melebihi batas. Panti ini sebagai tempat *shelter* aturan 10 hari baru dipindahkan di Panti Provinsi Jawa Tengah tetapi kenyataannya Panti Provinsi Jawa Tengah ini koutanya penuh terjadinya stuck di UPTD Among jiwo. Pada kenyataannya panti provinsi ini memiliki persyaratan untuk dipindahkan yaitu KTP dan BPJS tidak semua orang terlantar memiliki KTP kesulitan untuk akses dipindahkan ke Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah.”(wawancara Peksos, 2024).

Shelter ini bagi orang terlantar melewati berbagai proses assesment suatu program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat diimplementasikan baik ketika komunikasi terjadi efektif di kalangan pelaksana program dengan kelompok sasaran yaitu orang terlantar. Hal ini menjadi penting karena semakin banyak pengetahuan yang tinggi tentang kelompok sasaran program ini akan mengurangi tingkat levelnya penolakan dan kesalahan internal melaksanakan program dan kebijakan di dunia nyata. Hal ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses *shelter* sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif dapat terjadi jika informasi mengenai program diinformasikan secara akurat dan tepat sasaran sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman atau miskomunikasi. Dalam proses komunikasi ada beberapa hal yang mempengaruhi apa yang dimaksud dengan komunikasi apakah itu berjalan dengan baik atau tidak termasuk transmisi, kejelasan, konsistensi, memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing layanan terkait, koordinasi dan penjangkauan program penanganan orang terlantar.

Komunikasi yang diterapkan di UPTD Among Jiwo ini dimana jika ada orang terlantar baru dilakukan dengan pendekatan menanyakan identitasnya jika tidak memiliki identitas bisa dilakukan dengan sidik jari untuk pengecekan identitas KTP tetapi jika tidak memiliki sidik jari tidak terdaftar adanya KTP. Jika identitas ditemukan maka bisa dirujuk kembali ke tempat asalnya melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah misal orang terlantar tersebut tidak memiliki identitas maka akan tetap di UPTD Among Jiwo hingga nanti mendapat rujukan ke Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“Kasus yang terjadi ini terjadi adanya beberapa faktor seperti halnya anak terlantar yang bernama A dia melakukan terlantar diri karena melarikan diri dari pondok pesantren kemudian tertangkap pada saat razia satpoll PP lalu diberikan di Panti Among Jiwo lalu peksos melakukan pendekatan komunikasi menanyakan identitas A. Sesudah melakukan pengecekan identitas anak terlantar ini dilakukan penginapan sehari dipanti ini sambil menunggu penjemputan keluarganya, serta komunikasi ini juga dilakukan diberikan surat pernyataan kepada anaknya agar tidak melakukan penelantaran diri.”(wawancara Peksos, 2024).

2. Melihat dari segi sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya.

Keduanya mempunyai peran penting dan saling menguntungkan berhubungan satu sama lain. Karena tanpa kendala pelaksanaan program menjadi kurang energi dan berjalan lambat. Sementara itu, sumber daya keuangan dan tenaga menjamin kesinambungan program. Tanpa dukungan apa pun program keuangan yang memadai tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu keduanya harus diperhatikan agar menjamin keberlangsungan program. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo sebagai berikut:

“Untuk saat ini di Panti Among Jiwo ini belum memiliki kendala terhadap sumber daya tenaga ataupun keuangan dengan kapasitas orang terlantar yang melampaui batas yang seharusnya diisi 44 tetapi ada 70 orang dengan tenaga peksos sebanyak 22 orang.” (wawancara Peksos, 2024).

Hasil penelitian Kabupaten Semarang berkerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkaitan rehabilitasi *shelter* salah satunya Among Jiwo untuk menampung orang terlantar. Permasalahan orang terlantar di kabupaten Semarang diantaranya adalah banyaknya orang terlantar yang transit mengharuskan Dinas Sosial Kabupaten Semarang ini bekerja sama dengan UPTD Among Jiwo. Mereka biasanya di UPTD Among Jiwo untuk beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi untuk dipulangkan asal kotanya. Jika ditemukan identitasnya dilakukan pengembalian melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tetapi jika belum ditemukan maka tetap di UPTD Among Jiwo. Maka mereka diberikan kegiatan di UPTD Among Jiwo untuk bisa memberikan mereka dengan kehidupan yang lebih baik.

Orang terlantar yang sering ditemui adanya masalah ekonomi, karena tidak memiliki pendapatan. Meskipun ada

masalah ekonomi mereka sudah pernah rehabilitasi dipanti sosial mereka diberikan pemberdayaan tetapi terjadi pengulangan kembali di jalan raya. Ada juga pengemis yang pernah ketangkap saat razia peksos Dinas Sosial Kabupaten Semarang menanyakan identitasnya serta diberikan uang untuk pulang ketempat asalnya, tetapi tidak pulang ketempat asalnya tetap dijalanan kemudian tertangkap kedua kalinya lalu diberikan di tempat rehabilitasi panti sosial untuk diberikan pemberdayaan.

Orang terlantar umumnya takut akan penggerebekan dari Satpol PP, sehingga sering terjadi kejar-kejaran antar anggota bahkan orang terlantar ada juga yang melakukan perlawanan. Orang terlantar di Kabupaten Semarang umumnya berasal dari luar Kabupaten Semarang sekitar 70%, sementara itu sebanyak itu berasal dari Kabupaten Semarang 30%.

Sumber daya manusia adalah petugas dalam hal penanganan belum terpenuhi, dikarenakan anggota dari peksos belum mencukupi, serta untuk penanganan orang terlantar masih kurangnya tenaga peksos, di mana harus melakukannya penggerebekan atau pengamanan orang terlantar idealnya dilakukan oleh 20 (dua puluh) pada kenyataanya hanya melakukan 10 (sepuluh) orang termasuk satpol PP.

Berkaitan dengan sumber daya anggaran tidak ada anggaran khusus untuk orang terlantar. Anggaran di dinas sosial adalah anggaran untuk OTDT (orang ditinggalkan dalam perjalanan), jadi membutuhkan uang untuk orang terlantar menggunakan anggaran OTDT.

3. Kegiatan *Shelter*

Kegiatan *shelter* dalam mengimplementasikan faktor program PPMKS penentu kesuksesan bukan hanya jarak dimana para pembuat program menerapkan program secara efektif, akan tetapi

harus memiliki kemampuan internal mengimplementasikan program tersebut secara mendalam serta praktiknya, tidak ada ketimpangan program yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebisa mungkin dengan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Penelitian ini di UPTD Among Jiwo sudah mengimplementasikan program PPMKS yang dilakukan oleh peksos kepada orang terlantar dengan merawat melindungi tanpa adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :

- a. Peksos memberikan peran kehidupan kegiatan sehari-hari secara disiplin dengan memiliki aktivitas lebih baik. Seperti mereka sudah memiliki jadwal kegiatan mandi pagi dari jam 06.30-07.30 lalu jam 08.00-09.00 kegiatan sarapan orang terlantar. Para pekerja peksos UPTD Among Jiwo memberikan jadwal rutin agar senantiasa mereka melakukan kebiasaan yang lebih baik serta mereka diajarkan saling membantu untuk menyiapkan makan pagi, siang dan sore. Mereka membantu dalam pembuatan masakan makanan agar mereka juga menumbuhkan jiwa sosial membantu pekerjaan peksos yang menyiapkan masakan makanan tetapi mereka juga dilatih membuat makanan senantiasa mereka nanti keluar dari rehabilitasi bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Mereka setiap pagi sudah mengetahui jadwal membantu memasak untuk setiap makan hal ini melatih mereka untuk bekerja serta melatih kemampuan mereka untuk memasak serta peduli terhadap sesama teman yang ada di *shelter*” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

Gambar 4.1 Memberikan makanan kepada ODGJ terlantar



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

- b. Para orang terlantar setelah sarapan dilanjutkan dengan berjemur atau senam. Dilakukannya program senam jasmani dan rohani bagi orang terlantar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara holistik, baik dari segi fisik maupun mental. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dan manfaat dari program tersebut:
 1. Senam jasmani melibatkan gerakan-gerakan tubuh yang terencana dan teratur, yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, fleksibilitas, kekuatan otot dan keseimbangan tubuh.
 2. Program senam jasmani bagi orang terlantar dapat disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Gerakan-gerakan sederhana seperti *stretching*, aerobik ringan atau senam kegel dapat menjadi bagian dari program ini.
 3. Program senam rohani dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti meditasi, refleksi, yoga atau latihan pernapasan yang fokus pada relaksasi dan introspeksi diri.
 4. Manfaat dari senam rohani antara lain mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan konsentrasi dan fokus, meningkatkan ketahanan mental, membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan secara holistik.

Dengan menggabungkan senam jasmani dan rohani dalam satu program, diharapkan dapat memberikan manfaat yang komprehensif bagi orang terlantar baik dari segi fisik maupun mental. Program ini juga dapat menjadi sarana untuk membangun keterhubungan sosial dan emosional antar mereka serta meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri.

Gambar 4.2 Kegiatan Jasmani&Rohani Senam Serta Berjemur



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

- c. Setelah dilakukan senam pagi mereka diberikan obat penenang bagi mereka. ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) terlantar adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus termasuk dalam hal penggunaan obat penenang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan obat penenang harus selalu diawasi oleh tenaga medis yang berkompeten seperti dokter spesialis jiwa atau psikiater. Penting untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan obat penenang baik dalam dosis maupun jadwal konsumsi. Hal ini membantu menjaga stabilitas kondisi mental ODGJ dan mencegah fluktuasi yang berlebihan dalam suasana hati atau perilaku. Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas dan keamanan penggunaan obat penenang pada ODGJ terlantar. Jika diperlukan, penyesuaian dosis atau penggantian obat dapat dilakukan sesuai dengan respons dan kondisi mereka.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan obat penenang hanyalah satu aspek dari pengelolaan gangguan jiwa. Pendekatan yang holistik dan komprehensif, dukungan sosial dan perubahan gaya hidup merupakan kunci untuk membantu ODGJ terlantar menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Obat dibagikan setiap hari sudah menjadi kebiasaan rutin bagi mereka obat ini sebagai pengontrol jiwa pada ODGJ terlantar ini terkadang mereka juga tahu kapan mereka juga membutuhkan obat dan meminta pada peksos jika yang ada didiri mereka terancam atau sudah tidak terkontrol.”
(wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

Gambar 4.3 Rutin Setiap Pagi Memberikan Obat Penenang



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

- d. Kemudian juga dilakukan adanya pengecekan kesehatan yang dilakukan dua minggu sekali dengan berkerja sama Puskesmas Ngaliyan dokter melakukan kunjungan di UPTD Among Jiwo dengan pengecekan satu persatu pasien. Pengecekan kesehatan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) terlantar sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang sesuai dan meminimalkan risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi. Melalui pengecekan kesehatan yang teratur dan komprehensif diharapkan ODGJ terlantar dapat mendapatkan perawatan yang tepat dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka secara keseluruhan.

Gambar 4.4 Pemeriksaan Kesehatan



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

4. Rujukan dari Pantti Sosial

Rujukan dari shelter ke pantti sosial harus memenuhi beberapa syarat kondisi dari fisik hingga materi berupa berkas proses rujukan shelter orang terlantar ke Pantti Sosial Orang Terlantar (PSOT) dalam program PPMKS di Kabupaten Semarang yang berkerja sama dengan UPTD Among Jiwo dapat melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Penilaian

Ini dilakukan dengan tim atau petugas PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan identifikasi dan penilaian terhadap orang terlantar yang membutuhkan bantuan dan perlindungan tambahan termasuk mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki dukungan sosial atau mengalami masalah kesehatan fisik atau mental.

b. Pendaftaran dan Dokumentasi Orang Terlantar

Harus dilakukan kemudian yang telah diidentifikasi sebagai calon penerima bantuan PSOT didaftarkan dan didokumentasikan oleh petugas PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Informasi penting seperti riwayat kesehatan, kondisi sosial dan kebutuhan khusus lainnya dicatat untuk keperluan pengelolaan dan pemberian layanan.

c. Rujukan ke PSOT

Setelah proses identifikasi dan penilaian selesai, orang terlantar yang memenuhi kriteria rujukan ke PSOT dirujuk oleh petugas PPMKS ke panti sosial orang terlantar terdekat di Kabupaten Semarang yang berkerja sama dengan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah.

d. Proses Penerimaan di PSOT

Kepada PSOT kemudian orang terlantar yang dirujuk akan diterima dan diberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka akan diberikan tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan dasar, makanan, pakaian, serta bantuan dan dukungan sosial.

e. Pelayanan dan Rehabilitasi di PSOT

Orang terlantar akan menerima pelayanan rehabilitasi dan pemulihan yang mencakup layanan kesehatan, terapi psikososial, pelatihan keterampilan, bantuan dalam mencari pekerjaan atau tempat tinggal, serta dukungan dalam meningkatkan kemandirian mereka.

Salah satu program pemerintah yang sudah terwujud dengan mengadakan sosialisasi masak seperti halnya cara membuat kerupuk tulang ikan serta diberikan motor gerobak untuk berjualan bagi disabilitas terlantar.

Gambar 4.5 Sosialisasi Pemberdayaan



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

Gambar 4.6 Pemberian Bantuan Orang Terlantar Disabilitas



Sumber: Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

f. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan kunjungan Tim PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap orang terlantar yang dirujuk ke PSOT untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang sesuai dan memperoleh manfaat yang diharapkan dari program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Evaluasi ini juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program PPMKS di Kabupaten Semarang.

Melalui proses rujukan ini, diharapkan orang terlantar di Kabupaten Semarang dapat mendapatkan perlindungan, perawatan

dan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Selain itu juga kriteria penerima bantuan orang terlantar dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prioritas program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun umumnya beberapa kriteria yang terdapat di Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan orang terlantar dalam program PPMKS di Kabupaten Semarang meliputi:

a. Rujukan PGOT dan ODGJ

1. Untuk rujukan PMKS ke LKS dan Rumah Sakit Jiwa:
2. Masyarakat miskin atau tidak mampu yang dirujuk serta dikirim ke LKS, Rumah Sakit Jiwa.
3. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

b. Untuk rujukan PGOT ke Puskesmas dan RSUD:

1. Ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang PGOT yang sakit dan orang sakit jiwa serta dirawat di rumah sakit rujukan.
2. Ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang PGOT yang tidak beridentitas yang sakit dan orang sakit jiwa serta dirawat di rumah sakit rujukan.
3. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

c. Untuk PGOT yang ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit rujukan berdasarkan rujukan dari Puskesmas atau RSUD:

1. Dinas sosial membuatkan rekomendasi ke puskesmas atau RSUD berdasarkan permohonan dari puskesmas atau RSUD
2. Penerima bantuan menandatangani pakta integritas dan kuitansi tanda terima bantuan
3. Apabila PGOT yang ditemukan tidak beridentitas dan tidak diketahui ahli warisnya maka bantuan diterimakan pada TKSK

di wilayah kerjanya sekaligus menandatangani pakta integritas dan kuitansi tanda terima bantuan.

d. Untuk Rujukan PMKS ke LKS atau Rumah Sakit Jiwa:

1. Terhadap berkas permohonan bantuan yang masuk, dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

e. Untuk PGOT yang ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, yang sakit dan dirawat di rumah sakit rujukan berdasarkan rujukan dari Puskesmas atau RSUD:

2. 1 Terhadap berkas permohonan bantuan, dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang
2. 2 Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

f. Kegiatan yang dilakukan di Panti Sosial

Panti Sosial Orang Terlantar (PSOT) adalah lembaga yang menyediakan tempat tinggal, pelayanan, dan perlindungan bagi orang terlantar yang membutuhkan bantuan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan di PSOT sebagai berikut:

1. Tempat Tinggal Sementara

PSOT menyediakan tempat tinggal sementara bagi orang terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka diberikan tempat tidur, makanan, dan fasilitas dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Gambar 4.7 Kondisi Fasilitas Kamar Orang Terlantar



Sumber: Dokumentasi dari Hasil Observasi2024

2. Pelayanan Kesehatan Dasar PSOT

Memberikan pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan medis, pengobatan sederhana dan perawatan luka kepada orang terlantar yang membutuhkannya. Mereka juga dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut jika diperlukan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Selain ada pemeriksaan kesehatan yang diadakan 2 minggu sekali didalam panti kami juga menyediakan suster untuk mereka ketika para terlantar ini luka akan dirawat kami juga menyediakan obat-obatan lainnya.”(wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

Gambar 4.8 Pemeriksaan Kesehatan ODGJ Disabilitas



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi2024

3. Pelayanan Makanan dan Gizi dalam PSOT

Menyediakan pelayanan makanan yang cukup dan bergizi bagi orang terlantar. Mereka diberikan makanan yang seimbang untuk memastikan asupan gizi yang memadai. Dengan memberikan sehari 3 kali makan dalam pemenuhan makan dan gizi yang bermanfaat bagi orang terlantar.

Gambar 4.9 Pemberian Makanan ODGJ Terlantar



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa PSOT menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu orang terlantar meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Ini sudah pernah terwujudnya pelatihan sosialisasi salah satunya yang diberikan pelatihan memasak serta ada juga yang diberikan bantuan dalam bentuk material seperti penyandang disabilitas terlantar yang masih bisa diberdayakan oleh fisiknya dengan memberikan berkas kelengkapan apa saja serta mengingkan barang untuk pemenuhan kebutuhan agar terciptanya kehidupan yang sejahterah.

Gambar 4.10 Sosialisasi Orang Terlantar



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi2024

Gambar 4.11 Pemeriksaan Kesehatan ODGJ Disabilitas



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi2024

5. Kegiatan Rekreasi dan Hiburan di PSOT

Menyelenggarakan kegiatan rekreasi dan hiburan seperti senam, permainan atau acara sosial lainnya untuk memberikan hiburan dan mengurangi isolasi sosial bagi orang terlantar. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Biasanya kami adakan setiap jumat pagi adanya senam bersama selain itu juga adanya mahasiswa yang magang dengan mengadakan pemberian hiburan berupa sosialisasi seperti menanam tanaman serta kerja bakti bersama agar menumbuhkan jiwa mereka bergerak agar tidak merasa jenuh.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

Gambar 4.12 kegiatan jasmani&Rohani senam serta berjemur



Sumber: Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

6. Konseling dan Dukungan Psikososial

PSOT menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi orang terlantar yang membutuhkan. Mereka diberikan kesempatan untuk berbicara tentang masalah mereka dan mendapatkan dukungan dari petugas sosial atau konselor. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Kami juga bekerja sama dengan rumah sakit poli jiwa jika yang terdapat di ODGJ terlantar ini sakit atau kejiwaannya susah dikendalikan kami akan rujuk ke rumah sakit poli jiwa.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

7. Pengelolaan Kasus dan Perencanaan Masa Depan

Guna PSOT bekerja sama dengan orang terlantar untuk mengelola kasus mereka dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Ini dapat mencakup penyusunan rencana pemulangan, pencarian pekerjaan atau tempat tinggal atau mendapatkan bantuan sosial lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Banyak yang kami pulangkan hal ini melalui prosedur persyaratan apakah mereka sudah membaik secara kondisional dan fisik serta kami mengembalikan kepada keluarganya jika keluarganya tidak menerima maka kami kembalikan kepada

Dinas Sosial yang mereka tinggal.” (Wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

8. Kegiatan Keagamaan

Beberapa PSOT juga menyediakan kegiatan keagamaan seperti ibadah, doa bersama atau ceramah agama untuk memenuhi kebutuhan spiritual orang terlantar. Di PSOT mengundang beberapa ulama untuk mengisi didalam PSOT kami dari memimpin solat dan mengaji serta solawatan bersama. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami sering memanggil beberapa ustad sebelum covid untuk memimpin mereka solat, mengaji, serta solawatan bersama semenja adanya covid kita berhenti untuk memanggil para ulama dikarenakan biaya anggara APBDN tidak ada.” (wawancara Peksos UPTD Among Jiwo, 2024).

Kegiatan-kegiatan di PSOT bertujuan untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan dukungan kepada orang terlantar agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kembali mandiri secara sosial dan ekonomi. Sehingga ketika mereka kembali ke dunia masyarakat mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat diterima baik oleh keluarga dan lingkungan masyarakat.

B. Penerapan implementasi program PPMKS penerima manfaat

Adapun implementasi program PPMKS ini yang diterapkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Semarang antara lain :

1. Kehabisan Bekal

Kehabisan bekal ini sering terjadi adanya razia satpoll PP atau polisi saat mengadakan patroli hal ini mereka ditangkap serta dibawa ke kantor polisi dengan dimintai identitas berupa KTP lalu polisi memberikan surat keterangan orang terlantar untuk dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Semarang kemudian peksos melakukan assesment melalui identitas KTP. Setelah itu dilakukan assesment dokumen hingga foto. Para peksos mencari dinas sosial asal tempat mereka tinggal untuk mengetahui kenapa orang ini

terjadi terlantar yang bukan daerahnya. Tetapi para peksos sudah menanyakan alasan mereka terjadinya terlantar agar mencocokkan seperti daerah asalnya. Mereka sering melakukan terlantar alasan seperti mencari pekerjaan, ketipu lapangan pekerjaan, mencari anggota keluarga serta ada pemenuhan kegiatan kebutuhan sehari-hari yang memiliki pekerjaan pengemis dan gelandangan sebagai mata pencaharian. Maka dari itu peksos mempulangkan mereka yang bukan warga asli kabupaten semarang dengan mengikuti berbagai persyaratan assesment agar mendapatkan bantuan. Tetapi diberikan bantuan mereka juga dihubungkan dengan dinas sosial tempat asalnya untuk meminimalisir kejadian tidak menjadi terlantar kembali serta diberi bantuan oleh dinas sosial tetapi hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mereka menerima uang bantuan tetapi tidak Kembali ke kotanya melainkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari makan selain itu ketika mereka mengulang kejadian sama masih terlantar Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengambil tegas untuk tidak diberi bantuan tetapi diantarkan di daerah tempat asal jika hal itu masih bisa dijangkau. Tetapi daerah yang tidak bisa dijangkau akan diberikan tiket transportasi serta mereka harus lapor ke dinas sosial setiap pemberhentian daerah. Adapun Kehabisan bekal dalam konteks program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengacu pada situasi di mana sumber daya yang diperlukan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang terlantar mulai berkurang atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa faktor kendala yang dapat menyebabkan kehabisan bekal dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk orang terlantar:

a. Keterbatasan Anggaran

Salah satu penyebab utama kehabisan bekal adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Anggaran yang tidak mencukupi dapat membatasi

kemampuan program untuk memberikan bantuan yang memadai kepada orang terlantar.

2. Peningkatan Jumlah Orang Terlantar

Jika terjadi peningkatan jumlah orang terlantar yang membutuhkan bantuan sumber daya yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk menangani jumlah yang lebih besar ini menyebabkan kehabisan bekal.

3. Kendala Logistik atau Infrastruktur

Sering terjadinya kendala logistik seperti keterbatasan fasilitas tempat tinggal, fasilitas kesehatan atau transportasi dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan bantuan kepada orang terlantar terutama jika mereka tersebar di wilayah yang luas.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Terjadinya kehabisan bekal juga dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas atau relawan yang tersedia untuk melaksanakan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Kurangnya tenaga kerja dapat membatasi kemampuan untuk memberikan layanan yang memadai kepada orang terlantar.

5. Pergeseran Prioritas atau Kebijakan

Jika prioritas atau kebijakan pemerintah berubah alokasi sumber daya untuk program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga dapat menyebabkan kehabisan bekal jika program tersebut tidak lagi menjadi fokus utama.

6. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Rendah kurangnya dukungan dari masyarakat atau kurangnya kesadaran akan masalah orang terlantar juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya untuk program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Hal tersebut diungkapkan contoh kasus oleh salah seorang peksos Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam wawancara sebagai berikut:

“Orang telantar kehabisan bekal awal mula ada seseorang Ad berasal dari Banten dikarenakan mencari pekerjaan kemudian mendapatkan panggilan dan menuju tempat yang dilamar pekerjaan ternyata yang dilamar

pekerjaan tersebut penipuan dan akhirnya Ad kehabisan bekal karna uangnya habis di biaya transportasi. Ad akhirnya meminta bantuan dengan pihak wajib Ad kehabisan bekal disekitar arah alun-alun ungaran. Setelah lapor pihak berwajib dan mendapatkan surat keterangan Ad dibawa ke dinas sosial serta mendapatkan pertolongan di dinas sosial dengan mengikuti prosedur assesment untuk mendapatkan pertolongan berupa bantuan uang tunai sebagai bekal kembali ketempat asalnya” (wawancara Dinas Sosial Kabupaten Semarang, 2024).

Untuk mengatasi kehabisan bekal dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang perlu dilakukan langkah-langkah seperti pengelolaan anggaran yang lebih efisien, peningkatan kerjasama antar lembaga dan pihak terkait, peningkatan kesadaran masyarakat dan pencarian sumber daya tambahan dari pihak swasta atau lembaga donor. Dengan demikian program PPMKS dapat terus berjalan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang terlantar. Adapun syarat-syarat yang terdapat Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Untuk orang terlantar di perjalanan atau kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang:
 - a. Anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar atau kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang
 - b. Dibuktikan dengan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
2. Untuk meringankan masyarkat miskin penduduk kabupaten Semarang yang terlantar di luar wilayah Kabupaten Semarang:
 - a. Memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang
 - b. Tempat kejadian di luar wilayah Kabupaten Semarang
 - c. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang diketahui oleh Camat.

3. Tata Cara Pengajuan Bantuan

a. Untuk anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar di perjalanan atau kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang:

1. Menyerahkan surat keterangan kehabisan bekal dari kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang
2. Menandatangani pakta integritas dan kuitansi tanda terima bantuan.

4. Untuk masyarakat miskin atau tidak mampu warga Kabupaten Semarang yang terlantar di wilayah luar Kabupaten Semarang:

- a. Terhadap berkas permohonan bantuan yang masuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang
- b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. adalah laporan kejadian orang terlantar dari kepala desa atau lurah sesuai asal wilayah yang bersangkutan

Bantuan uang tunai ini berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui dinas sosial diberikan kepada orang telantar yang kehabisan bekal digunakan untuk perjalanan kembali ke daerah asal hal ini sudah tercantum pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pertama jika penduduk kabupaten menerima bantuan sebesar Rp 75.000,00
2. Kemudian kategori kedua jika antar kabupaten dalam provinsi menerima bantuan sebesar Rp 150.000,00
3. Selain itu kategori ketiga antar provinsi dalam pulau Jawa menerima sebesar Rp 200.000,00

4. Yang terakhir kategori ke empat antar provinsi di luar pulau jawa sebesar Rp 250.000,00.

2. Bencana Alam

Orang terlantar yang terjadi karena bencana alam merupakan situasi di mana individu atau kelompok kehilangan tempat tinggal dan sumber daya lainnya sebagai akibat langsung dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan atau badai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa orang terlantar dapat terjadi setelah bencana alam:

1. Kerusakan Infrastruktur

Bencana alam seringkali menyebabkan kerusakan pada infrastruktur penting seperti rumah, jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal mereka dan menjadi terlantar.

2. Kehilangan Aset dan Pekerjaan

Terjadi Bencana alam dapat merusak atau menghancurkan aset dan sumber daya ekonomi seperti tanaman, ternak, peralatan atau usaha mikro. Akibatnya banyak orang kehilangan sumber penghasilan mereka dan tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

3. Kerusakan Lingkungan Dampak

Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar termasuk tanah dan air. Tanah yang tercemar atau tergenang banjir dapat membuat wilayah tersebut tidak layak dihuni memaksa penduduk setempat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.

4. Korban Luka dan Trauma Psikologis

Bencana alam sering kali menyebabkan korban luka fisik dan trauma psikologis pada individu dan keluarga mereka. Korban yang terluka mungkin membutuhkan perawatan medis yang intensif atau

rehabilitasi sementara yang mengalami trauma psikologis mungkin memerlukan dukungan konseling dan mental.

5. Pengungsian dan Evakuasi

Untuk menghindari bahaya yang lebih lanjut banyak orang yang terkena dampak bencana alam dipaksa untuk mengungsi atau dievakuasi dari wilayah yang terkena dampak. Mereka sering kali kehilangan akses ke rumah dan aset mereka selama periode ini.

6. Krisis Kemanusiaan dan Ketersediaan

Bantuan Bencana alam dapat menciptakan krisis kemanusiaan di mana kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal dan perawatan medis menjadi sulit diakses. Hal ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi terlantar dan bergantung pada bantuan eksternal. Orang terlantar yang terjadi karena bencana alam memerlukan tanggapan cepat dan efektif dari pemerintah, lembaga kemanusiaan dan masyarakat umum untuk memberikan bantuan, perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyediaan tempat pengungsian, distribusi bantuan pangan dan non-pangan, perawatan medis, rehabilitasi infrastruktur dan program pemulihan yang berkelanjutan.

Gambar 4.13 Memberikan Bantuan Bencana Alam Orang Terlantar





Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

Adapun persyaratan bantuan bencana alam terdapat Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 tahun 2022 sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat korban bencana alam:
 - a. Warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Semarang;
 - b. Tempat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Semarang
 - c. Laporan kejadian bencana dari lurah atau kepala desa atau camat.
 - d. Dinas sosial memverifikasi data korban bencana alam melalui pilar pilar kesejahteraan Sosial dan apabila dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Orang Terlantar yang Meninggal

Orang terlantar meninggal dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang merupakan situasi yang menyedihkan dan menuntut tanggapan yang serius. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menyebabkan orang terlantar meninggal dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Kondisi Kesehatan

Buruk banyak orang terlantar menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental yang serius akibat kurangnya akses terhadap layanan

kesehatan yang memadai sebelum bergabung dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Kondisi ini dapat menjadi faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan kematian.

2. Penuaan dan Kebutaan

Sebagian besar orang terlantar adalah lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit kronis dan gangguan kesehatan terkait penuaan. Jika mereka tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai dan risiko kematian bisa meningkat.

3. Pengabaian dan Kekerasan

Orang terlantar rentan terhadap pengabaian, kekerasan dan eksploitasi yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Kekerasan fisik, penyalahgunaan zat atau perlakuan tidak manusiawi lainnya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka dan mengancam nyawa.

4. Kondisi Lingkungan yang Buruk

Orang terlantar sering kali tinggal di lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat, seperti jalanan, taman kota atau tempat-tempat terbuka lainnya. Paparan terhadap suhu ekstrem, polusi udara atau kondisi lingkungan lainnya dapat meningkatkan risiko kesehatan dan kematian.

5. Kurangnya Akses terhadap Layanan Kesehatan

Orang terlantar sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai termasuk akses terhadap perawatan medis darurat. Kurangnya akses ini dapat memperlambat respons medis dan meningkatkan risiko kematian dalam situasi darurat.

6. Keterbatasan Sumber Daya dalam Program PPMKS

Kurangnya seperti fasilitas kesehatan yang terbatas kurangnya personel medis atau relawan atau keterbatasan dana untuk perawatan kesehatan dapat menyulitkan upaya untuk memberikan perawatan yang tepat waktu dan efektif kepada orang terlantar.

Meninggalnya orang terlantar dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyoroti pentingnya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, perlindungan sosial yang lebih baik dan pemberian perhatian yang lebih besar terhadap populasi yang rentan ini. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi kemanusiaan dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah kompleks dan mencegah kematian yang tidak perlu di antara orang terlantar. Adapun syarat bantuan orang terlantar meninggal sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. PGOT yang tidak memiliki identitas diri
 2. Tempat kejadian di wilayah Kabupaten Semarang.
- b. Untuk warga masyarakat miskin Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang:
 1. Memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang
 2. Tempat kejadian di luar wilayah Kabupaten Semarang
 3. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang diketahui oleh camat.
- c. Untuk biaya orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. Aparat desa atau kelurahan melaporkan adanya kejadian orang terlantar dan meninggal di desa atau kelurahan setempat ke Dinas Sosial Kabupaten Semarang
 2. Menyerahkan surat keterangan kematian dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- d. Untuk orang terlantar yang meninggal di luar RSUD di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. Laporan kejadian orang terlantar meninggal dari kepala desa atau lurah setempat dilakukan verifikasi oleh TKSK

2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari TKSK dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada bupati melalui dinas sosial untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- e. Untuk warga masyarakat miskin Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang :
 1. Laporan kejadian orang terlantar meninggal dari dinas sosial, rumah sakit, TKSK, kepala desa dan lurah tempat kejadian peristiwa dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang
 2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

C. Analisis implementasi program PPMKS Kabupaten Semarang

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya teori Talcott Parson yang menyatakan bahwa masyarakat ialah salah satu bagian suatu sistem sosial berasal struktur-struktur saling berhubungan dan berkerja sama untuk membentuk keseimbangan. Talcott Parsons mengembangkan teori AGIL sebagai kerangka kerja untuk memahami fungsi sistem sosial dalam mencapai keseimbangan dan stabilitas. Teori AGIL merujuk pada empat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh sistem sosial: *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi) dan *Latency* (latensi). Meskipun teori AGIL tidak secara langsung membahas implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang bagi orang terlantar, konsep-konsep dalam teori tersebut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana program ini dapat berfungsi dalam konteks sistem sosial yang lebih luas:

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Konsep adaptasi mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dengan perubahan seperti

perubahan dalam tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan kesehatan atau perubahan kebijakan publik. Program PPMKS harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan ini. Dalam konteks implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam beradaptasi dapat mengacu pada kemampuan program tersebut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang beragam dari orang terlantar serta berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi kondisi mereka. Dinas Sosial Kabupaten Semarang perlu mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang beragam dari orang terlantar yang bisa meliputi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, makanan, layanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan dukungan sosial.

Program ini harus fleksibel dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok. Implementasi Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang perlu mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang beragam dari orang terlantar yang bisa meliputi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, makanan, layanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan dukungan sosial. Program ini harus fleksibel dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok. Program terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang harus dapat mengadopsi dan mengembangkan inovasi dalam pendekatan mereka untuk mengatasi tantangan yang kompleks terkait orang terlantar. Ini bisa melibatkan pengujian model-model baru, teknologi baru atau kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Hal ini Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang perlu memiliki mekanisme evaluasi yang terus-menerus untuk memantau kinerja dan dampaknya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut program harus dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai secara optimal. Organisasi atau lembaga PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang perlu belajar dari pengalaman lalu untuk meningkatkan kinerja masa depan.

Dengan memperhatikan konsep adaptasi dalam teori Talcott Parsons implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat dirancang dan dijalankan dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi yang berubah sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi orang terlantar dan masyarakat secara keseluruhan.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Konsep pencapaian tujuan menyoroti pentingnya sistem sosial untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang pencapaian tujuan program ini melibatkan penyediaan perlindungan, pemberdayaan, layanan kesehatan, Pendidikan dan dukungan lainnya kepada orang terlantar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas dan terukur, termasuk target dan jenis layanan yang akan diberikan. Setelah menetapkan tujuan, lakukan perencanaan strategis dengan identifikasi langkah konkret, alokasi sumber daya, dan jadwal waktu PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dilanjutkan dengan mobilisasi sumber daya, koordinasi, dan implementasi kegiatan dan layanan yang direncanakan. Pantau terus kemajuan program untuk mencapai tujuan dengan data kinerja, evaluasi, dan identifikasi area perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada program PPMKS Kabupaten Semarang jika diperlukan. Pelaporan rutin diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Dengan memperhatikan konsep pencapaian tujuan dalam teori Parsons, implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat dipandu dengan lebih terarah dan terfokus untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi orang terlantar.

3. *Integration* (Integrasi)

Integrasi adalah kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah, non-pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan lainnya untuk layanan terlantar dengan koordinasi yang baik. Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang adalah kerja sama antara lembaga, organisasi, dan individu yang membantu orang terlantar dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Konsep integrasi dalam teori Talcott Parsons mengacu pada koordinasi dan kohesi antara semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang terdiri dari layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan bantuan sosial untuk memberikan bantuan holistik dan terintegrasi kepada orang terlantar. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan memperkuat dukungan masyarakat.

Integrasi membangun kerjasama kuat antara berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, pendidikan, perusahaan dan masyarakat sipil. Program ini membantu orang terlantar dengan dukungan sosial, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan layanan lainnya. Dengan memperhatikan konsep integrasi dalam teori Parsons, implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat dipandu dengan lebih terkoordinasi dan terpadu sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak orang terlantar.

4. *Latency* (Latensi)

Latensi dalam implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang terkait dengan memperbaiki kondisi struktural yang menyebabkan orang terlantar, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu terkait orang terlantar, dan membangun kapasitas individu dan

komunitas untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam teori Talcott Parsons, latensi merujuk pada fungsi-fungsi yang menjaga dan memperbaharui sistem sosial dalam jangka panjang. Hal ini menjaga stabilitas dan kelangsungan program PPMKS Dinas Sosial Semarang dengan kelembagaan yang kuat dan infrastruktur yang diperlukan. Implementasi Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang perlu dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk berhasil.

Upaya latensi melibatkan membangun hubungan yang baik, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program. Upaya latensi untuk memperkuat dan mereproduksi nilai-nilai sosial program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang melibatkan kampanye, advokasi, dan pembangunan kapasitas masyarakat. Latensi fokus pada pemeliharaan, reproduksi, adaptasi lingkungan, dan keberlanjutan program PPMKS Dinas Sosial Semarang. Ini melibatkan inovasi dan perubahan struktural untuk menghadapi tantangan baru. Pembangunan generasi muda sebagai pemimpin futureproof yang mendukung program PPMKS melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kepemimpinan dengan nilai sosial solidaritas dan tanggung jawab.

Dengan memperhatikan konsep latency dalam teori Parsons implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat dipandu dengan lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat memastikan bahwa program tersebut mampu memelihara stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan orang terlantar dalam jangka Panjang. Memahami konsep-konsep dalam teori AGIL implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat dirancang dan dievaluasi dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi sistem sosial yang mendasarinya. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya dan berdampak positif bagi orang terlantar dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM PPMKS ORANG TERLANTAR YANG DITERAPKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

Implementasi program PPMKS terhadap orang terlantar sebagai (pencegahan, penanganan, penyembuhan dan pemberdayaan penerima manfaat). Dalam hal ini untuk menilai dampak secara lebih rinci dapat dilakukan evaluasi terhadap implementasi program tersebut termasuk dalam hal efektivitas, efisiensi dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat memiliki dampak tertentu, baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa dampak dalam implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai berikut:

A. Dampak Internal

1. Status Kesehatan Orang Terlantar

Dampak internal status kesehatan orang terlantar akibat implementasi program PPMKS orang terlantar dapat bervariasi tergantung pada efektivitas program dan upaya yang dilakukan. Seperti halnya pencegahan penyakit dan kondisi kesehatan yang buruk dengan adanya akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan medis, perawatan dan pengobatan implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi resiko kondisi kesehatan buruk di kalangan orang terlantar. Selain itu di UPTD juga adanya obat-obatan umum selain yang diberikan dokter ketika mereka terdapat penyakit pada umumnya. Penderita ini juga merawat orang terlantar terjadinya penyakit ataupun dengan kondisi buruk. Ketika terjadi kondisi buruk mereka akan dirujuk di rumah sakit jiwa yang cukup besar dengan pelayanan sudah terdaftar kartu BPJS. Selain itu penurunan tingkat penyakit menular dengan adanya akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, program PPMKS dapat membantu dalam menurunkan tingkat penyakit dan penyakit menular di antara populasi orang terlantar. Ini

termasuk penyakit menular seperti tuberkulosis, hepatitis dan infeksi menular seksual.

Peningkatan kesadaran kesehatan melalui edukasi dan penyuluhan kesehatan yang disediakan melalui program PPMKS orang terlantar dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat menyebabkan perubahan perilaku positif yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan mereka. Bagi orang terlantar yang mengalami masalah kesehatan mental, program PPMKS yang menyediakan layanan dukungan psikososial dan intervensi dapat membantu dalam proses pemulihan kesehatan mental. Ini termasuk layanan konseling, dukungan emosional dan akses terhadap perawatan kesehatan mental yang sesuai. Hal tersebut diungkapkan contoh kasus oleh salah seorang penerima manfaat UPTD Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya berada di sini merasakan kehidupan saya teratur setiap harinya yang diberikan peksos kepada kita, selain itu mengajarkan kita hidup bersi dalam kegiatan sehari-hari didalam sel ini menjadikan kehidupan saya nanti keluar menjadi positif yang lebih baik.”(wawancara penerima manfaat,2024).

Gambar 4.14 Memwawancarai ODGJ Terlantar



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi2024

2. Kehidupan Kembali Normal

Implementasi program PPMKS orang terlantar bagi orang terlantar dapat memiliki dampak yang signifikan dalam membantu mereka kembali kepada kehidupan yang lebih normal. Implementasi program PPMKS dapat

menyediakan fasilitas perumahan atau perlindungan sementara bagi orang terlantar, membantu mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak. Dengan memiliki tempat tinggal yang stabil, orang terlantar dapat kembali merasakan rasa aman dan nyaman yang diperlukan untuk memulai kehidupan yang normal. Program PPMKS juga dapat membantu orang terlantar untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian dan perawatan kesehatan. Adanya memenuhi kebutuhan dasar ini, orang terlantar dapat fokus pada pemulihan kesehatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Beberapa program PPMKS mungkin juga mencakup pelatihan keterampilan dan bantuan untuk mencari pekerjaan atau menciptakan peluang mata pencaharian. Memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan yang stabil, orang terlantar dapat mendapatkan kemandirian finansial dan mengembalikan kehidupan mereka ke jalur yang lebih normal. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Sudah banyak orang terlantar sudah memiliki kehidupan normal dengan bantuan kementrian sosial berupa rehabilitasi, sosialisasi, bantuan barang untuk memenuhi kesejahteraan kehidupannya dan ada yang dikembalikan kepada keluarganya untuk menjaga anggota keluarganya agar tidak menimbulkan penyimpangan terlantar secara dirinya sendiri.”(wawancara peksos, 2024).

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang penerima manfaat UPTD Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“ Saya sudah merasaya nyaman dengan kehidupan yang lebih baik dan normal serta teratur yang diberikan oleh peksos, sudah memiliki jadwal pagi mandi makan berjemur kegiatan olahraga serta membantu pekerja disini agar nantinya bisa hidup kembali dimasyarakat.” (wawancara penerima manfaat, 2024).

3. Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Terlantar

Program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberikan perlindungan kepada orang terlantar dengan menyediakan tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan dasar, makanan, pakaian dan perlindungan sosial lainnya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk

memberdayakan orang terlantar dengan memberikan pelatihan keterampilan, dukungan untuk mencari pekerjaan dan bantuan dalam meningkatkan kemandirian. Seperti halnya yang diterapkan UPTD Among Jiwo pada saat terdapat anak magang dengan memberikan pelatihan bercocok tanam sayur-sayuran sebagai kegiatan mereka agar tidak bosan. Hal tersebut diungkapkan contoh kasus oleh salah seorang penerima manfaat UPTD Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya pernah diberikan kegiatan cara bertanam sayuran dengan pekerja disini kemudia hasilnya ditaruh belakang rumah ini, saya senang dengan adanya kegiatan ini.” (wawancara penerima manfaat, 2024).

4. Tingkat Pendidikan Meningkat

Implementasi program PPMKS bagi orang terlantar dapat memiliki dampak terhadap peningkatan tingkat pendidikan mereka. Program PPMKS dapat menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan bagi orang terlantar, baik itu dalam bentuk program pendidikan formal maupun non-formal. Ini bisa termasuk akses ke sekolah dasar atau menengah, kursus keterampilan, pelatihan vokasional, atau program pendidikan dewasa. Beberapa program PPMKS mungkin juga mencakup pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan orang terlantar dalam bidang tertentu. Ini dapat membantu mereka memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk memasuki pasar kerja.

Program PPMKS dapat menyediakan dukungan tambahan bagi orang terlantar yang ingin mengejar pendidikan mereka, seperti bantuan keuangan untuk biaya sekolah, beasiswa atau bimbingan akademik. Dukungan ini dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh orang terlantar dalam mengakses pendidikan. Dengan mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk belajar, orang terlantar dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mengejar pendidikan dan meningkatkan kualifikasi mereka. Pendidikan dapat menjadi faktor penting dalam memotivasi mereka untuk meraih tujuan dan meraih

kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos UPTD Among Jiwo dalam wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah kementrian sosial berkerja sama dengan kementrian Pendidikan untuk memberikan beberapa persen peluang orang terlantar melanjutkan bersekolah secara gratis hal ini sudah beberapa sekolah memberikan peluang orang terlantar untuk melanjutkan bersekolah.”(wawancara peksos, 2024).

5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Melalui program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang orang terlantar di Kabupaten Semarang memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan ini berkerja sama dengan beberapa puskesmas yang diberikan pengunjungan dokter kepada rehabilitasi sosial, pendidikan yang diberikan ini berupa sekolah gratis untuk anak-anak terlantar yang diberikan pemerintah, pekerjaan ini diberikan orang terlantar yang memiliki skill akan diberikan lowongan untuk memenuhi kesejahteraan kehidupan dan dukungan sosial berupa bantuan secara barang untuk membuat peluang usaha. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hal ini diterapkan melalui UPTD Among Jiwo yang sudah memberikan berbagai fasilitas salah satunya kesehatan yang diadakan dua minggu sekali pengunjungan dokter yang berkerja sama dengan puskesmas ngaliyan melakukan pengecekan seluruh kesehatan serta apa yang sedang dialami kesakitan. Hal tersebut di ungkapkan oleh salah seorang penerima manfaat dalam wawancara sebagai berikut:

“Disini saya diperlakukan dengan baik memberikan pelayanan pengecekan kunjungan dokter terhadap kesehatan yang ada disini, selain itu juga kami dilatih untuk membantu para pekerja agar nantinya keluar dari sini menjadi lebih baik, banyak yang keluar dari sini diberikan bantuan dari segi materi seperti sembako serta alat yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan.”(wawancara, penerima manfaat,2024)

Gambar 4.15 Memeriksa ODGJ Terlantar



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

6. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dari kesejahteraan sosial pelaksanaan program rehabilitasi sosial dapat memulihkan fungsi sosial mereka, salah satunya dari segi mental bagi para gelandangan dan pengemis. Pengaruh psikologi dalam program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam menangani orang terlantar berhubungan dengan perubahan pola pikir dan mental penerima manfaat pasca diberikan program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang salah satunya berkaitan dengan rehabilitasi. Ini membutuhkan ada intervensi dari Pemerintah kabupaten semarang yang berkerja sama dengan pemerintah provinsi kota semarang melalui program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang rehabilitasi kegiatan sosial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terdiri dari beberapa kegiatan seperti motivasi, diagnosis psikososial dan konseling psikososial.

Dalam memberikan suatu program motivasi dan diagnosis psikososial sesuai dengan peraturan, Pelayanan Sosial UPTD Among Jiwo dilaksanakan melalui bimbingan mental psikososial hal ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan kondisi psikologis penerima manfaat PGOT seperti mampu mengendalikan diri, disiplin dan perilaku yang lebih baik. Rehabilitasi memberikan suatu bentuk program bimbingan konseling sosial dan psikososial, UPTD Among Jiwo dilakukan dengan memberikan kegiatan

bimbingan perubahan sosial. Panduan perubahan sosial bertujuan untuk mengubah pola kehidupan sosial.

1. Pola pikir dan kondisi mental masyarakat penerima manfaat UPTD Among Jiwo setelah dan sebelum mendapatkan program mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya seperti keseluruhan masih memiliki karakter mental lemah untuk mengenal masalahnya.
2. Ketakutan terhadap jiwa orang terlantar yang menimbulkan rasa kekhawatiran
3. Tidak menemukan solusi terhadap permasalahannya

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo sebagai berikut: rehabilitasi sosial mereka tidak bisa memiliki kemampuan pemecahan masalah sehingga tidak adanya solusi baik. Seperti halnya sebagai berikut :

“Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peneliti, mereka memasuki Rumah Pelayanan Sosial UPTD Among Jiwo ini masyarakat yang mayoritas ODGJ merasa ketakutan terhadap masalahnya salah satunya mental dari sini ODGJ tidak menemukan solusi masalah bagi dirinya sendiri, dari sini mereka menjadikan kondisi sosial masyarakat resah terhadap kehadirannya hal ini menjadikan masyarakat lapor kepada Dinas Sosial. adapun selain ketidaknyamanan dari masyarakat itu sendiri melainkan dikarenakan razia dari satpoll pp ini yang menjadikan mereka berada di rehabilitasi sosial. Jika orang terlantar seperti gelandang, pengemis ataupun orang terlantar ini akan dikembalikan ketempat asal ataupun di keluarga melalui tempat shelter UPTD Among Jiwo yang berjangka waktu 10 hari.”(wawancara Peksos, 2024).

kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dijelaskan kondisi sebelum menerima program rehabilitasi sosial mereka sangat sulit memecahkan masalahnya. Setelah memasuki lembaga sosial UPTD Among Jiwo kondisi yang diinginkan sesuai peraturan dan norma hukum yang berlaku di lingkungan hidup sosial. Orang terlantar ini seharusnya bisa memilikinya mental yang kuat untuk menghadapi sesuatu masalah, melainkan sesuai kenyataannya mereka belum bisa menemukan solusi bagi diri sendiri. Hal ini setelah berada di rehabilitasi mereka menemukan Solusi.

Kegiatan program rehabilitasi sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi penerima manfaat paska menyelesaikan program di

rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan dirasakan beberapa penerima manfaat salah satunya berdampak positif yang sudah keluar dari UPTD Among Jiwo. Salah satunya ODGJ berhasil memperbaiki kehidupan kegiatan sehari-hari yang teratur menjadi lebih baik, telah berhasil mengatasinya masalah itu sendiri dengan memiliki pola pikir dan mental yang baik untuk menghadapi situasi yang terjadi. Penerima manfaat bisa diketahui permasalahan yang dihadapi seperti untuk memulai dunia usaha yaitu beberapa penerima manfaat pensiun keluar dari rehabilitasi telah berhasil dengan memiliki mental kuat, pola pikir dan mentalitas yang baik normatif. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang penerima manfaat Among Jiwo sebagai berikut:

“ Pada saat awal mereka masuk sudah diberikan bimbingan serta arahan kegiatan sehari-hari guna untuk menjadikan diri disiplin. Bimbingan ini berupa mental, spiritual, kepedulian sekitar, kesehatan dan pemberdayaan. Mereka ini senantiasa bisa merawat dirinya sendiri agar bisa menyelesaikan masalah yang ada dirinya sendiri tetapi juga mereka ada yang tidak bisa bertahan dengan rehabilitasi melarikan diri dari tempat.”(wawancara penerima manfaat, 2024).

Mereka mencoba mengatasinya masalah seperti memiliki mental lingkungan jalanan. Jadi, melalui program ini rehabilitasi sosial dibimbing untuk mampu mengenali masalah melalui bimbingan dan konseling sosial psikososial dengan menyesuaikan kondisi kemampuan memecahkan masalah. Hal ini dapat diketahui dengan cara kesesuaian kondisi yang dialami sesuai harapan kondisi yang diinginkan.

Dari ketiga tersebut berlaku untuk melakukan perubahan kondisi saat ini menjadi suatu kondisi yang diinginkan oleh penerima manfaat setelah keluar dari rehabilitasi UPTD Among Jiwo. Keberhasilan program untuk ketiganya tidak dapat dipisahkan dari suatu program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh peksos pelayanan Sosial UPTD Among Jiwo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mereka mampu dapat menyelesaikan masalah mereka miliki dan menemukan solusi terhadap permasalahan itu.

Berdasarkan penerima manfaat mereka yang telah keluar dari UPTD Among Jiwo sudah mengalaminya dampak perubahan yang dirasakan

kondisi mental dan pola pikir yang baik melalui kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan oleh penerima manfaat rehabilitasi setelahnya bagi mereka yang tidak mampu untuk mengenali atau menyelesaikan masalah dengan baik. Dalam bimbingan konseling sosial dan psikososial untuk dapat memecahkan masalah dapat dirasakan oleh penerima PGOT. Dalam menerapkan program tersebut dari bentuk program bimbingan sosial dan psikososial oleh UPTD Among Jiwo.

Dari sini dapat dilihat saat menyelesaikan kasus adanya orang terlantar seperti anak terlantar dikarenakan keluar dari pondok pesantren kemudian di rehabilitasi selama 10 hari agar senantiasa tidak melakukan menelantarkan diri agar Kembali di masyarakat lebih baik, UPTD Among Jiwo memberikan solusi setelah rehabilitasi untuk menghubungkan dengan orangtua bertemu dengan anak bertujuan agar anak diberikan bimbingan yang lebih baik. Penerima manfaat rehabilitasi bisa menemukan jalan keluarnya dalam mengatasi permasalahan. Selain itu penerima manfaat rehabilitasi merasakan dampak secara mental karena dari UPTD Among Jiwo memberikan cukup motivasi, mengembalikan kegiatan kehidupan yang lebih baik, memberikan jiwa sosial saling peduli antar anggota rehabilitasi, pentingnya kesehatan bagi diri sendiri dan mendekatkan diri kepada tuhan. Hal ini dapat mendorong kehidupan mereka yang lebih baik.

Kondisi kemampuan permasalahan penerima manfaat setelah rehabilitasi dapat diketahui dengan cara kesesuaian kondisi yang dialami kondisi yang diinginkan. Ketiga, situasi saat ini telah berubah kondisi yang diinginkan, karena para penerima manfaatnya kini setelah rehabilitasi lebih banyak memilih untuk bekerja seperti orang terlantar kembali dengan mendapatkan uang secara cepat. Hal ini karena sulit mengubah cara berpikir dan mentalitas hidup jalan yang sudah terpasang lebih disukai jalan pintas menuju pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dampak psikologis terhadap program rehabilitasi sosial ini belum tercapai mendorong perubahan pola pikir dan mentalitas penerima manfaat. Hal ini terlihat dari perubahan kondisi mental penerima manfaat yang berawal merasa ketakutan paska

rehabilitasi merasa aman dengan perlindungan di UPTD Among Jiwo. Sehingga penerima manfaat yang sudah di rehabilitasi sudah merasa nyaman di rehabilitasi ini yang seharusnya sudah bisa dikembalikan ke daerah asalnya tidak ingin pulang ke daerah asalnya.

B. Dampak Eksternal

Implementasi program PPMKS bagi orang terlantar juga dapat memiliki dampak eksternal tertentu di luar individu yang langsung dilayani. Berikut adalah beberapa dampak eksternal yang mungkin terjadi:

1. Peningkatan Dukungan Masyarakat

Implementasi program PPMKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap masalah orang terlantar. Melalui program ini, masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan, dukungan, dan solusi untuk membantu orang terlantar di Kabupaten Semarang. Ini sangat berpengaruh bagi untuk orang terlantar yang masih dipedulikan oleh Masyarakat dengan memberikan bantuan berupa sembako serta kebutuhan lainnya. Dikarenakan bantuan pemerintah belum semuanya mencakup serta pada saat adanya kejadian covid terdapat kendala di anggran APBDN bantuan masyarakat sangat meringankan bagi orang terlantar. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo sebagai berikut:

“ Dukungan yang diberikan ini berupa memberikan bantuan langsung berupa makanan, pakaian serta barang-barang lainnya. Selain itu juga menyediakan layanan dasar kesehatan, mandi serta lainnya.” (wawancara peksos,2024).

2. Peningkatan Kerjasama antar lembaga

Program PPMKS melibatkan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pemerintah, organisasi non-profit dan masyarakat sipil. Hal ini dapat memperkuat jaringan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas program dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi orang terlantar. Kerja sama berbagai antar lembaga sangat berpengaruh seperti halnya di UPTD Among Jiwo dibawah nangan Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang berkerja sama diberbagai

rumah saki jiwa yang besar meningkatkan adanya layanan gawat darurat ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan.

3. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari program rehabilitasi sosial ini dapat diketahui itu untuk dapat menjalankan fungsinya secara sosial dengan tepat kemandirian ekonomi melalui mata pencaharian penghidupan normatif. Standar ini mencapai kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat setelah keluar dari rehabilitasi berdasarkan kemampuan mengambil inisiatif.

Dalam memberikan bentuk programnya rehabilitasi sosial sesuai peraturan ditetapkan sebagai pedoman pelatihan dan pembinaan kejuruan kewirausahaan. UPTD Among Jiwo dilaksanakan dengan memberikan bimbingan keterampilan bekerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa penerimanya manfaat memiliki keterampilan kerja praktis dalam memenuhi kebutuhannya.

Panti pelayanan sosial UPTD Among Jiwo juga memberikan bantuan dan asisten sosial. Bantuan ini berkerjasama dengan kementerian sosial untuk memberikan bantuan berupa pemberdayaan pelatihan serta perhatian kemensos dengan memberikan bantuan mengembangkan usaha penerima. Beranda pelayanan Sosial UPTD Among Jiwo juga memberikan bimbingan resosialisasi yang disalurkan oleh panduan pada kegiatan magang dengan mengupayakan. Panduan resosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan para penerima manfaat sehingga mereka mampu mengubah kehidupan dapat diterima kembali di lingkungan kehidupan sosial serta mempersiapkan bagi keluarga dan masyarakat untuk menerima orang terlantar setelah keluar dari UPTD Among Jiwo.

Sebelum melakukan aktivitas kegiatan program rehabilitasi sosial semua orang terlantar tidak memiliki prinsip inisiatif kemampuan untuk menjalani hidupnya yang baik. Faktor yang menyebabkan mereka memilih telantar karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pendidikan serta juga tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah mendapatkan program rehabilitasi sosial penerima manfaat diharapkan

mempunyai kemampuan inisiatif untuk bisa mencari pekerjaan sendiri. Penerima manfaat setelah rehabilitasi adalah mampu mengambil inisiatif setelah menerima program rehabilitasi sosial seperti bisa mulai usaha yang lebih baik. Beberapa penerima manfaat setelah berhasil merasakan dampaknya program rehabilitasi sosial dengan mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya permasalahan yang dihadapi.

Penerimaan manfaat paska keluar dari UPTD Among jiwo mendapatkan bantuan perhatian dari Kementerian Sosial untuk mengembangkan usaha. Orang terlantar yang diberikan bantuan kemensos kategori disabilitas terlantar yang masih bisa di berdayakan, Kementrian sosial memberikan berupa motor roda tiga untuk berdagang gorengan. Ada penerima manfaat yang merasakannya kegiatan resosialisasi terdistribusi mendapatkan pekerjaan. Penerima manfaat paska rehabilitasi sosial mampu melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan kejuruan kewirausahaan sebagai salah satu mata penghidupan normatif mereka.

Gambar 4.16 Penyerahan Bantuan Disabilitas



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

Dokumentasi diatas salah satu penerima manfaat yang merasakan dampak positif, adapun tidak semua penerima manfaat paska rehabilitasi merasakan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi karena masih banyak penerima manfaat tetap kembali bekerja di jalanan karena tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Ini terjadi karena mereka belum bisa memiliki kegigihan untuk berjuang dan tidak bisa mengetahui

peluang sekitar. kondisi saat ini keinginan mereka yaitu bekerja dijalanan yang sudah sebagai sumber penghidupan tetapi merugikan norma dan hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

Tidak ada penerima manfaat dari rehabilitasi sosial dapat mencapai dampak ekonomi pada hidupnya. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak merasakan aktivitas tersebut panduan resosialisasi untuk disebarkan pekerjaan atau magang serta tidak diberikan bantuan untuk diberikan ijazah atau sertifikat. Penerima manfaat paska rehabilitasi juga tidak mendapatkan bantuan perhatian untuk mengembangkan usahanya sekaligus perhatian bantuan mengembangkan usaha. Jadi, mereka Ini belum memiliki kemampuan mengatasi permasalahan perekonomian mandiri kepada orang lain. Tidak ada penerima manfaat paska rehabilitasi mengalami kegiatan bimbingan pelatihan ini mendapatkan hasil maksimal yang bisa dilakukan sesudah menyelesaikan program rehabilitasi sosial.

Implementasi bimbingan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan hanya sebatas itu saja berdasarkan ide UPTD Among Jiwo sendiri dalam menyesuaikan diri kebutuhan penerima manfaat. Penerapan pelatihan dan pembinaan kejuruan kewirausahaan ini kurang dilakukan maksimal karena jadwal individu kegiatan pelatihan hanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu dan berlangsung tepat waktu relatif singkat. Hal ini sudah dilaksanakan pembinaan kewirausahaan bagi orang terlantar diberikan pemberdayaan pembuatan kerupuk tulang ikan yang dilakukan di Aula Kecamatan Bergas.

Gambar 4.17 Sosialisasi Kerupuk Tulang Ikan



Sumber : Dokumentasi dari Hasil Observasi 2024

4. Dampak Sosial

Dampak sosial dari kesejahteraan sosial dapat menjalankan fungsi sosialnya secara alami melalui interaksi mandiri dan berpartisipasi dengan lingkungannya. Dampak sosial pada program rehabilitasi dalam menangani orang terlantar berhubungan dengan perubahan perilaku, sikap atau pola kebiasaan kehidupan, dan kemandirian sosial berinteraksi dengan orang lain. Dalam memberikan dampak sosial memerlukan intervensi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk memberikan dampak sosial.

Masalah ini yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu panduan lebih lanjut dapat menjamin masyarakat tersebut beradaptasi dengan baik lingkungan kehidupan sosial. Bimbingan mental dan spiritual atau keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan orang terlantar melakukan kegiatan keagamaan seperti beribadah. Dalam bentuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial yaitu bimbingan sosial dan konseling psikososial. Layanan Rumah Sosialisasi UPTD Among Jiwo pembinaan melalui bimbingan sosial yang bertujuan untuk dapat pulih dan berubah perilaku penerima manfaat.

Mengenai dampak sosial diketahui bahwa melihat kondisi sosial seperti sikap, perilaku dan pola kehidupan para penerima manfaat sebelumnya mengikuti program rehabilitasi sosial. Hal ini dapat dijelaskan secara keseluruhan penerima manfaat memiliki sikap, tingkah laku dan pola kebiasaan hidup yang buruk dan telah melekat kehidupan jalanan. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan orang terlantar termasuk kebiasaan minum

keras, tidak mempunyai tingkat kesabaran tertentu baik, melakukan perbuatan tercela dan tidak mempunyai disiplin waktu. Dengan Masalah ini tentu saja memerlukan intervensi lebih lanjut untuk menghindari kesenjangan lingkungan masyarakat sekitar.

Setelah mendapatkan program rehabilitasi sosial, penerima manfaat secara keseluruhan setelah rehabilitasi berhasil mengalami perubahan tingkah laku, sikap dan pola kebiasaan hidup yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo sebagai berikut:

“Dari ini kami berikan berupa tempat tinggal bagi orang terlantar berupa rehabilitasi sosial untuk menampung para orang terlantar serta diberikan pengarahan didalam rehabilitasi, perlindungan mental orang terlantar dari ancaman luar, pemenuhan kebutuhan makanan layanan kesehatan fasilitas yang diberikan orang terlantar”(wawancara Peksos, 2024).

Masalah ini beberapa dari mereka dapat memiliki sikap atau perilaku yang lebih sabar, ikhlas, rendah hati dan tabah. Perubahan perilaku hal ini terjadi adanya program rehabilitasi sosial, khususnya bimbingan mental, spiritual, konseling sosial dan psikososial memberikan pembukaan pemikiran spiritual kepada masyarakat penerima manfaat setelah rehabilitasi sosial. Dengan mengikuti program rehabilitasi sosial untuk bimbingan mental dan spiritual dapat mendorong mereka untuk selalu berpikir positif. Keberhasilan perubahan ini dapat dilihat pada bimbingan dan konseling sosial psikososial. Panduan ini bisa memberikan pemahaman tentang dirinya dan perilaku yang berkaitan dengannya lingkungan. Dengan mencapai perubahan perilaku telah menyimpang menjadi normatif sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku lingkungan kehidupan sosial. Semua penerima manfaat setelah keluar dari UPTD Among jiwo mencapai kemandirian dalam interaksi dengan orang-orang melalui cara mereka merespons permasalahan sosial dengan baik.

Implementasi program panduan lebih lanjut memastikan para penerima manfaat paska rehabilitasi menjalankan peran sosialnya dengan baik dalam interaksi sosial di masyarakat. Ada orang yang belum menerima program bimbingan lebih lanjut, sebagai untuk mengetahui bahwa peneriman manfaat tersebut dapat berjalan dengan lancar baik atau tanpa masalah dilingkungan sekitar. Dalam mencapai kemandirian interaksi penerima manfaat bisa

diketahui dari cara mereka menemukan solusi yang dihadapi melalui permasalahan pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat. Ini menjadikan mereka selalu dalam proses interaksi sosial dengan orang lain dan tidak memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan negatif pada dirinya. Kemandirian interaksi penerima manfaat setelah rehabilitasi tidak dapat dipisahkan bimbingan dan konseling sosial psikososial.

Kondisi kemampuan dapat diselesaikan melalui permasalahan penerima manfaat setelah dari UPTD Among Jiwo dapat diketahui dengan cara kesesuaian kondisi dialami sehingga menjadi kondisi yang diinginkan. mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan dengan cara menyikapi permasalahan dengan baik. Semua penerima manfaat setelah keluar dari rehabilitasi memiliki kondisi jalan kemandirian interaksi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerima manfaat sudah merasakan dampak sosialnya positif tentang diri mereka sendiri ketika mereka berperilaku, kebiasaan hidup yang positif, disiplin dan cara mereka bersosialisasi dengan baik setelah mengikuti program rehabilitasi sosial.

5. Dampak Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan terhadap program rehabilitasi sosial dalam pengobatan orang terlantar dalam perubahan kondisi kehidupan setelah menerima program rehabilitasi sosial. Perubahan kondisi kehidupan terjadi penerima manfaat paska rehabilitasi agar tidak kembali menjadi orang terlantar. Dalam memberikan dampak lingkungan kehidupan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu bimbingan dan konseling sosial psikososial. Rumah Pelayanan Sosial UPTD Among Jiwo dilakukan melalui bimbingan perubahan sosial bertujuan untuk kondisi penerima manfaat mementingkan kebutuhan kehidupan sosial. Berada Pelayanan Sosial Among Jiwo dalam melaksanakan bimbingan resosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan penerima manfaat. Pembinaan dilakukan melalui konsolidasi belajar dan bekerja penerima dalam masyarakat dan kesiapan untuk menentukan tempat tinggal bagi dirinya secara mandiri, mereka biasanya tinggal di kost atau sewa dan dapat dikembalikan ke keluarga.

Tentang dampak lingkungan sebelum memasuki program rehabilitasi sosial, penerima manfaat secara keseluruhan tidak mempunyai kemampuan solusi yang baik untuk pilih tempat bagus untuk tinggal serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Seluruh para terlantar ini belum melakukan pengenalan masalah yang baik dengan fokus pada penentuan strategi yang tepat dalam penyelesaian masalah. Mereka belum mengetahui cara yang benar dalam memecahkan masalah kondisi kehidupan sebagai jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Mereka memutuskan untuk tinggal di UPTD Among Jiwo untuk dapat menikmati fasilitas dan beberapa di antara mereka mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Dari sini dimana mayoritas di UPTD Among Jiwo ODGJ lebih nyaman tinggal disini karena mereka sudah tidak merasa ketakutan dengan diberikan pelayanan melindungi bagi mereka menjadikan mereka harus dikembalikan tempat asalnya tetapi tidak dikembalikan karena sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Serta penerima yang berhasil bisa dipulangkan dalam menentukan tempat tinggal yang tepat untuk Penerima manfaat adalah tergantung pada kondisi perekonomian yang dihadapi agar mencukupi biaya perumahan. Penerima manfaat berhasil untuk memecahkan masalah dan mengalami perubahan kondisi lokal tinggal. Penerima manfaat yang sudah keluar hal ini dapat mengidentifikasi masalah dengan menetapkan strategi yang baik. Dapat dilihat dalam mengatur keuangan yang baik dengan berharap tidak melakukan hidup di jalanan lagi. Kemampuan penerima manfaat paska rehabilitasi dapat diketahui dengan mencari solusi yang ada. Penerima manfaat paska rehabilitasi dengan menabung dari hasilnya pekerjaannya selama dia berada di UPTD Among Jiwo. Hal ini terjadi dari metode diskusi dilakukan pada bimbingan sosial dan konseling psikososial untuk memecahkannya masalah mereka. Selain itu, ada penerima manfaat melakukannya bimbingan resosialisasi dengan persiapan kepada keluarganya dan lebih memilih untuk melakukannya tinggal bersama orang tua. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peksos Among Jiwo sebagai berikut:

“ Terdapat kasus anak terlantar yang melarikan diri dari pondok pesantren ditemukan pihak satpollpp dibawa ke UPTD Among Jiwo lalu kami tanyakan identitasnya serta melakukan assement untuk mengetahui identitasnya. Setelah ketemu identitasnya pihak UPTD Among Jiwo menghubungkan pihak orang tua untuk dijemput serta diberikan arahan bimbingan.”(wawancara Peksos, 2024).

Menyelesaikan kondisi kemampuan permasalahan penerima manfaat paska rehabilitasi dapat diketahui dengan cara kesesuaian kondisi hingga kondisi yang diharapkan. Mengubah keadaan saat ini menjadi keadaan apa yang diinginkan dapat dijelaskan mereka berhasil mengubah kondisi saat ini untuk tidak kembali tinggal dijalan dan mempunyai tempat tinggal untuk kehidupan mereka terpenuhi kebutuhan hidup seperti tinggal di kost atau sewa dan kembali bersama keluarga. Ada penerima manfaat yang belum berhasil mengubah kondisi tempat tinggal mereka secara mandiri dengan bergantung pada UPTD Among Jiwo. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan penerima manfaat paska rehabilitasi telah mengenali masalah dapat memiliki tempat tinggal setelah mendapatkan program rehabilitasi sosial.

Panduan resosialisasi minimal dilaksanakan oleh panduan resosialisasi dilaksanakan oleh UPTD Among Jiwo seharusnya meningkatkan kontribusi persiapan dan pengawasan penerima manfaat UPTD Among Jiwo seharusnya meningkatkan kontribusi persiapan dan pengawasan Penerima manfaat. Dampak lingkungan dari program ini rehabilitasi sosial mengembalikan mereka ke masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan lingkungan sosial serta diterima lebih baik lingkungan sosial.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh penelitian mengamati kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program PPMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Satpol PP dalam penyediaan rehabilitasi dan meminimalisir orang terlantar selain itu memiliki rencana program yaitu pemberdayaan, kesehatan, rehabilitasi, pemulihan dan bantuan sosial. Program ini dapat menguku tingkat keberhasilan suatu program berjalan dengan baik maka akan berhasil serta dilakukan adanya evaluasi berjalan secara efektif. Bantuan yang diberikan program PPMKS berupa layanan sosial, kesehatan, pendidikan, ketrampilan, kesejahteraan sosial, psikososial dan perlindungan sosial
2. Implementasi program PPMKS memiliki 2 dampak yaitu dampak internal dan eksternal. Dampak internal antara lain edukasi kepada orang terlantar pentingnya kesehatan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, memberikan ketrampilan dan berkerja sama dengan layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu ada dampak eksternal meliputi mengurangi resiko kesehatan buruk, hilang dari rasa khawatir, memberikan pekerjaan, meningkatkan kehidupan yang baik, bantuan sosial usaha dan bisa menyelesaikan masalah sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang implementasi program PPMKS orang terlantar Dinas Sosial Kabupaten Semarang ada beberapa saran yang diberikan:

1. Saran bagi Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebaiknya melakukan evaluasi mengenai program PPMKS untuk mengetahui seberapa efektifnya program tersebut sehingga dapat berjalan lebih baik lagi. Evaluasi ini dapat meliputi perencanaan program, implementasi program dan dampak dari program PPMKS.
2. Saran untuk Masyarakat mengetahui implementasi program PPMKS di beberapa wilayah atau komunitas yang memiliki tingkat perilaku

menelantarkan diri yang tinggi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan atau tantangan dalam menerapkan program PPMKS untuk masyarakat yang rentan menelantarkan diri.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti di masa mendatang dalam hal-hal yang belum tercakup, misalnya meneliti mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi program PPMKS. Fokus penelitian dapat termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, peran dan tanggung jawab komunitas dalam mendukung program, serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023). Retrieved from BPS Jenis Kelamin Kabupaten Semarang:
<https://semarangkab.bps.go.id/indicator/12/692/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- 79, P. B. (2022). *peraturan bupati*. Kabupaten Semarang.
- Andari, S. (2018). Harapan Baru Gelandangan dan Pengemis melalui Program Desaku Menanti Dikota Padang. *Sosio Konsepia*.
- Anisya Dwi Septiani R, Widjojoko, Deni Wardana. (n.d.). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Perseda*, 5(2).
- Apriyanti, Muh Nur Yamin dan Andi Cudai Nur. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makasar. *Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2).
- Arniyanti, Tanzil, Bahtiar. (2023). Peran Dinas Sosial terhadap Anak Terlantar di Kota Kedari. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1).
- Asep, I. U. (2012). *Al Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang.
- Asti, Nuraeni, Prita Adisty Handayani, Hilda Mazarina Devi, Siti Juwariyah dan Maya Cobalt Anglo Septianingtyas. (2023). *Komunitas Ajar Perawat*. Jakarta Selatan.
- Auliana, K. (2023). *Pemberdayaan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)*. Sosiologi, Universitas Walisongo Semarang, Semarang.
- Bernard Raho, Ritzer. (2021). *Teori Sosiologi modern*. Bantul Yogyakarta: Moya Zam Zam.
- Diyah Puspita Wijayanti, Eny Kusdarini. (2022). Penanggulangan Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan Anak Jalanan Bagian dari Upaya Satpoll PP Kabupaten Klaten. *UNPAD*, 11(4).

- Djubaydi, Dedi, Asmuni Ahmad dan Nurhayati Eti. (2023). *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Terlantar* . Lombok Tengah .
- Eka Kartini dan Dedi Epriadi. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan di Kota Batam. *Ilmiah Mahasiswa*, 4(5).
- Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani dan Windriyati. (2020). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa. *Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2).
- Hairani, Siregar, Fajar Utama Ritonga, dan Sinaga Kasea Putra Randa. (2023). *Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti*. Banguntapan Yogyakarta.
- Hakim, H. T. (2017). Pelaksanaan Bimbingan Anak Terlantar Guna Meningkatkan Life Skills Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kumuda Putra Putri". *Pendidikan Luar Sekolah*, 1(2).
- Hasruddin Mukmin, Syahril Ramadhan, Zainul Abiddin. (2022). Kebijakan Pelayanan Orang Terlantar Di Era Pelabuhan Murhum Oleh Dinas Sosial Kota Baubau. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Indahsari, N. D. (2021). *Analisis Kualitas Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Dinas Sosial Kota Magelang*. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Magelang.
- Jenita, P. L. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Anak Jalanan di Kota Tasikmalaya). *Unigal*, 2(2).
- Juhariah, S. (2019). *Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar*. Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten.

- Kartini, E. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Kota Batam*. Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam.
- Laksanto, Utomo. (2020). *Hukum Jaminan Sosial*.
- Lilis Ariska, Alamsyah, Junaidi. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan LLIR. *Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*, 1(1).
- Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra. (2020). Al Quran dan Pengentasan Kemiskinan. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- M Danang Wicaksono, Hartawan, Agus Tiansah. (2022). Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) di Kota Lubuklingau. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(1).
- Maryatun, Santoso Tri Raharjo dan Budi Muhammad Taftazani. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Ilmu Administrasi*, 13(2).
- Meiliana, D. (2019). Retrieved from AntarNews: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada-77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>
- Muhammad Apriza Hidayat, Erfan Karyadiputra, Budi Setiadi. (2023). *Aplikasi Pengelolaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berbasis Web*. Teknik Informatika, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan.
- Muhammad Nurhuda Syahroni Yaman. (2018). Evaluasi Sistem Informasi Orang Terlantar Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur . *Administrasi Publik*, 6(3).

- Ni Putu Ruslina Darmayanthi dan Badrudin Kurniawan. (2021). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Ilmu Administrasi Negara*, 9(5).
- Nikodemus dan Yulasteriyani . (2020). Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Prespektif Fungsionalisme Struktural. *Dakwah dan Sosial*.
- Notowidagdo,Ulmilla Dhia. (2022). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* . Jakarta.
- Nur Handayani dan Ambarawati Ayu Gusti. (2019). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2(2).
- Nurul Aeni. (2021). Respon Agama Terhadap Kemiskinan Perspektif Sosiologi. *Sosiologi Agama Indonesia*, 2(1).
- Payandro Doni Saputra Sitanggang, Berlianti, Fajar Utama Ritonga. (2023). Peningkatan Pelayanan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara secara Adaptif Responsif, Terstruktur dan Sistematis . *Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Peraturan Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012*. (2012).
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Ilmu Komunikasi*, 6(1).
- Prasetyo, J. (2021, Maret). Retrieved from Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang: <https://sitangkas-ugm-gis.hub.arcgis.com/documents/7113a80d496f4b26b06c02436778dfd0/about>
- Pratama, A. G. (2019). Sistem Informasi Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial untuk Orang Terlantar Berbasis Web. *Situstika*, 3(2).
- Putri, P. A. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kota Jambi*. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi.

- Qorina Salsabila, Purba Gabriela dan Saragih Evayanti Selvia. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis. *Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3).
- Rachmawati, Vita dan Faedlulloh Dodi. (2020). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *politik*, 2(2).
- Raden Mahendra Haryo Bharoto dan Nursahidin. (2021). Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan. *Ilmu Administrasi Reformasi*, 5(2).
- Raden Mahendra Haryo Bharoto dan Nursahidin. (2021). Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan di Kota Cirebon. *Ilmu Administrasi Reformasi* , 5(2).
- Rahmi Ayunda, Hari Sutra Disemadi, Ryan Wijaya. (2020). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan dan Pengemis Di Kota Batam. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3).
- Rilla, Sovitriana. (2021). *Aspek Psikologi Wanita Terlantar dan Permasalahannya* . Makasar.
- Sekarini, A. Y. (2019). Analisis Kinerja Aparatur Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Samarinda. *IPDN*, 5(2).
- Semarang, B. D. (2022). Retrieved from BPS Kabupaten Semarang: <https://semarangkab.bps.go.id/indicator/12/543/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-wajib-ktp-dan-kepemilikan-ktp-di-kabupaten-semarang.html>
- Semarang, B. F. (2022). Retrieved from Dinas Kesehatan: <https://semarangkab.bps.go.id/statictable/2015/12/18/124/banyaknya-fasilitas-kesehatan-di-kabupaten-semarang-tahun-2022.html>

- Semarang, B. K. (2022). Retrieved from BPS Kabupaten Semarang:
<https://semarangkab.bps.go.id/indicator/108/51/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama.html>
- Semarang, B. P. (2022). Retrieved from Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Semarang:
<https://data.semarangkab.go.id/ckan/dataset/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kab-semarang>
- Semarang, B. P. (2022). Retrieved from Ekonomi Kabupaten Semarang:
<https://semarangkab.bps.go.id/pressrelease/2023/02/28/208/ekonomi-kabupaten-semarang-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Kabupaten%20Semarang%20Tahun%202022%20Tumbuh%205%2C31%20persen,-Unduh%20BRS%20Ini&text=Perekonomian%20Kabupaten%20Sem>
- Semarang, B. T. (2021). Retrieved from BPS Angkatan Kerja:
<https://semarangkab.bps.go.id/indicator/6/110/1/angkatan-kerja.html>
- Simanjuntak, N. O. (2017). Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Menurut UU No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Beras Tagi). *Pusham Unimed*, 8(1).
- Siti Nurul Hamidah, Uzieka Arsiya Rosadha, Ari Alfiansyah, Abdul Hafidz dan Mutamimatussifah. (n.d.). Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani Banten. *UIN Banten*, 7(1).
- Soedjarwo, Y. A. (2020). Peran Instruktur dalam Pelatihan Ketrampilan Sulam di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. *UNESA*, 4(1).
- Sofyatun Rohma, U. Z. (2023). Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok). *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 8(2).

- Sri Sulastri dan Sahadi Humaedi. (2017). Pelayanan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti. *UNPAD*, 4(1).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian .
- Suharismi, A. (2006). Dasar-Dasar Research.
- Sulaeman dan Ghozali Masnul Alim. (2023). Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bogor. *Sosial dan Politik*, 4(1).
- Tazia Rizky Widiani, Dyah Lituhayu dan Endang Larasati Setianingsih. (2022). *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penangan Gelandangan dan Pengemis Di Provinsi Jawa Tengah*. Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tiara Khairunnisa, Eko Priyo Purnomo dan Lubna Salsabila. (2020). Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan di Kota Yogyakarta. *Moderat*, 6(1).
- Try Wiganda Irfan, Erlinda dan Zahirman. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Anak Jalanan. *Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3(1).
- Veronica Sri Astuti, Eko Yudianto, Apriliansah. (2023). Peran Dinas Sosial PPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) Di Kota Probolinggo. *Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1).
- Wijayanti, Puspita Diyah dan Kusdarini Eny. (2022). Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan Bagian dari Upaya Satpoll PP Kabupaten Klaten. *Kajian Mahasiswa PPKN*, 11(4).

LAMPIRAN

1. Memberikan Makanan kepada ODGJ Terlantar



Lampiran 2. Kegiatan Jasmani&Rohani Senam Serta Berjemur



Lampiran 3. Rutin Setiap Pagi Memberikan Obat Penenang



Lampiran 4. Pemeriksaan Kesehatan



Lampiran 5. Sosialisasi Pemberdayaan



Lampiran 6. Pemberian Bantuan Orang Terlantar Disabilitas



Lampiran 7. Kondisi Fasilitas Kamar Orang Terlantar



Lampiran 8. Memberikan Bantuan Bencana Alam Orang Terlantar



Lampiran 9. Memberikan Bantuan Bencana Alam Orang Terlantar



Lampiran 10. Memwawancarai ODGJ Terlantar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Putri Wisudawati
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 22 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Wisma Prastya V No 15 RT 03 RW 06, Kel.
Sambirejo, Kec Gayamsari Kota Semarang
No. Whatsapp : 087838116029
Email : putriwisudawati941@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. TK Abba 33 | :2007-2008 |
| 2. SDN Muhammadiyah 17 Semarang | : 2008-2014 |
| 3. SMP Walisongo 1 Semarang | : 2014-2017 |
| 4. SMA N 10 Semarang | : 2017-2020 |